



**MENCEGAH KEINGINAN BEBERAPA DAERAH
UNTUK MEMISAHKAN DIRI DEMI TEGAK UTUHNYA
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA**

BHAKTI - DHARMA - WASPADA

Oleh :

AMIRUL ISNAINI

MAYOR JENDRAL TNI

**KERTAS KARYA PERORANGAN (TASKAP)
KURSUS SINGKAT ANGKATAN IX LEMHANNAS
TAHUN 2001**

PERPUSTAKAAN
PERGURUAN TINGGI ILMU KEPOLISIAN
JAKARTA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami persembahkan kepada Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, karena atas ridho karunia-Nya serta rahmat yang diberikannya maka Kertas Karya Perorangan (TASKAP) yang merupakan bagian terpenting dari rangkaian kurikulum dan persyaratan kegiatan Peserta Kursus Singkat Lemhannas telah dapat kami selesaikan. TASKAP yang ditetapkan lembaga dengan judulnya :

**“MENCEGAH KEINGINAN BEBERAPA DAERAH
UNTUK MEMISAHKAN DIRI DEMI TEGAK UTUHNYA
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”**

Penulisannya ini banyak dilatar belakangi oleh keprihatinan yang mendalam terhadap penyelesaian paham separatisme khususnya di daerah Aceh dan Irian Jaya yang tetap berkeinginan untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pertikaian elit politik bangsa yang diimplementasikan dalam bentuk adu kekuatan massa serta konflik berskala kecil lainnya dampak dari otonomi daerah, sehingga diharapkan tulisan ini dapat menjadi sumbang saran terhadap penyelesaian mencegah keinginan beberapa daerah khususnya Aceh dan Irian Jaya untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.


Penyelesaian penulisan TASKAP ini tentunya atas bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak dan khususnya kepada TUTOR *Mayjen TNI Ferrial Sofyan, Widyasiswara Utama Bidang SARA* yang telah membimbing dan mengarahkan TASKAP ini sejak awal proses penulisannya.

Penulis menyadari sepenuhnya karena keterbatasan berbagai hal maka TASKAP ini belumlah merupakan konsepsi yang sempurna untuk itu saran dan koreksi yang konstruktif bagi penyempurnaan TASKAP ini sangat diharapkan, dan kiranya hanya kepada Tuhan Yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana jualah karya dan do'a dipersembahkan.

“Lebih Baik Pulang Nama Dari Pada Gagal di Medan Tugas”. (Kopassus).

Jakarta, April 2001

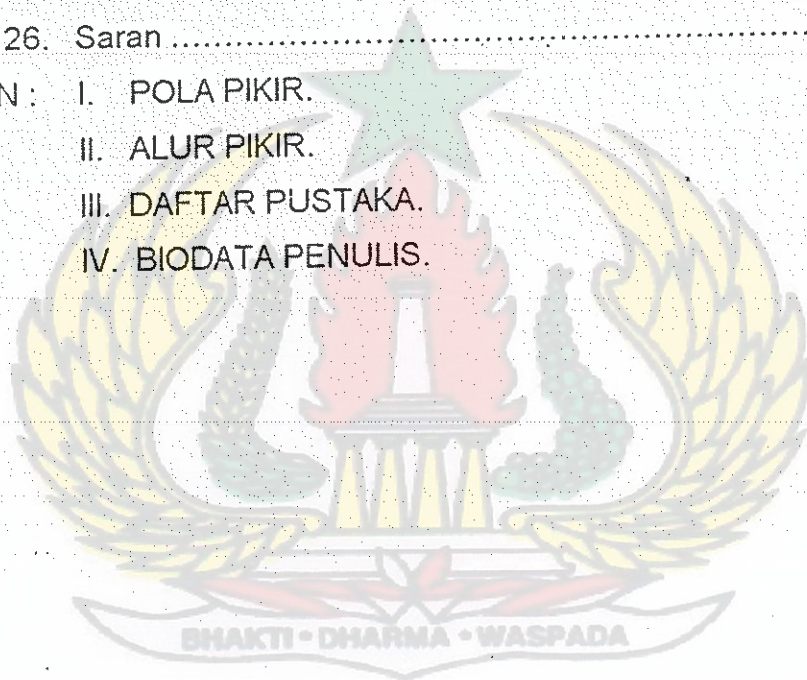
Penulis,


AMIRUL ISNAINI
MAYOR JENDERAL TNI

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Umum	1
2. Maksud dan Tujuan	6
3. Ruang Lingkup dan Sistematika.....	6
4. Methoda dan Pendekatan	8
5. Pengertian-pengertian	9
BAB II LANDASAN PEMIKIRAN DAN PERSPEKTIF TEORI	13
6. Umum	13
7. Hal-hal yang mendasari	16
8. Perspektif teori	22
BAB III FENOMENA AKTUAL BEBERAPA DAERAH UNTUK MEMISAH KAN DIRI	41
9. Umum	41
10. Tinjauan Kesejarahan dan Latar Belakang	42
11. Fenomena Kebebasan	55
12. Fenomena Aktual dengan Faham Otonomi Daerah	61
13. Fenomena Aktual dengan Faham Politik Praktis dengan memanfaatkan issue SARA	65
BAB IV PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS	86
14. Umum	86
15. Global	87
16. Regional	90
17. Nasional	92
18. Peluang dan Kendala	96

BAB V	TANTANGAN MASA DEPAN	99
	19. Umum	99
	20. Tinjauan Masa Kini dan Masa Mendatang	100
	21. Prospek Tantangan Masa Depan	103
BAB VI	KONSEPSI PENCEGAHAN	115
	22. Umum	115
	23. Kebijaksanaan	116
	24. Strategi Pencegahan dan Upaya	120
BAB VII	PENUTUP	128
	25. Kesimpulan	128
	26. Saran	129
LAMPIRAN :	I. POLA PIKIR.	
	II. ALUR PIKIR.	
	III. DAFTAR PUSTAKA.	
	IV. BIODATA PENULIS.	



BAB I PENDAHULUAN

1. Umum.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang diproklamasikan 17 Agustus 1945, dihayati oleh bangsa Indonesia sebagai rahmat dan berkat Tuhan Yang Maha Esa, dengan dasar itulah dilaksanakan pembangunan disegala bidang. Namun sekalipun rakyat dan penyelenggara negara, segenap komponen bangsa telah berusaha menegakkan dan melestarikan NKRI, namun masih ada ancaman, hambatan, tantangan dan gangguan terhadap tegak utuhnya NKRI. Kondisi diatas pada akhirnya dipengaruhi pula tibanya era global yang mengedepankan demokratisasi, hukum dan HAM serta pasar bebas dan pesatnya kemajuan dibidang teknologi, transportasi, telekomunikasi serta turisme. Dimana era tersebut diatas arusnya adalah dari negara-negara maju menuju dan mengarah kepada negara-negara berkembang.

Kemajemukan yang rentan konflik, otonomi daerah yang belum terwujud (masih dalam proses), kebijakan yang terpusat, otoriter, serta tindakan ketidakadilan pemerintah yang dipicu oleh hasutan serta pengaruh gejolak politik internasional dapat mendorong terjadinya disintegrasi bangsa yang membahayakan keutuhan NKRI (GBHN 1999-2004 Bab II, Kondisi Umum).

Kekhawatiran tentang perpecahan (disintegrasi) nasional, agaknya berangkat dari kondisi di tanah air dewasa ini yang dapat digambarkan sebagai penuh konflik dan pertikaian, gelombang reformasi yang tengah berjalan,

menimbulkan berbagai kecenderungan dan realitas baru. Segala hal yang terkait dengan orde pemerintahan Soeharto, termasuk format politik dan paradigmanya, dihujat dan dibongkar dan berkecenderungan menjadi suatu bentuk polarisasi istilah Orde Baru dan Orde Reformasi. Bermunculan pula aliansi ideologi dan politik yang ditandai dengan menjamurnya partai-partai baru. Seiring dengan itu, lahirlah sejumlah tuntutan daerah-daerah di luar Jawa agar mendapatkan otonomi yang lebih luas atau merdeka sendiri dan lepas dari NKRI. Lebih bertambah parah masalahnya manakala diwarnai terjadinya konflik dan benturan yang bernuansa SARA dengan segala permasalahannya seperti munculnya politik adu domba dengan mengkristalkan massa.

Pada saat negeri ini belum bisa mengatasi krisis nasional yang masih berlangsung, utamanya krisis ekonomi, fenomena politik dewasa ini telah benar-benar meningkatkan derajat kekhawatiran atas kokohnya integrasi nasional kita. Konon, jika sepiintas menengok keluar, diujung fragmentasi negara Uni Soviet dan Yugoslavia beberapa tahun yang lalu kondisi ekonomi dan politik kedua negeri itu pun juga buruk. Akibatnya pemerintah pusat goyah, dan negara-negara bagian mendapat momentum untuk mengembangkan pilihan politiknya masing-masing. Perang saudara di Yugoslavia dan separatisme di Uni Soviet pun tidak bisa dihindari. Akhirnya, kedua negara federasi itu lenyap dari percaturan sejarah dan peta politik dunia. Apakah Indonesia akan menjadi Uni Soviet dan Yugoslavia berikutnya? Bila tidak mau, lalu bagaimana mencegahnya? Sedangkan menurut M. Ryaas Rasyid kasus disintegrasi bangsa dan bubarnya negara bermula dari Gatra Ekonomi yang sakit berat dan

berlangsung lama sehingga menjadi faktor signifikan lahirnya krisis yang lain, selanjutnya Gatra Politik pecahnya elit sehingga sulit melahirkan kebijaksanaan yang arif, dan Gatra Sosial Budaya terjadinya disharmoni timbul konflik kekerasan yang bernuansa SARA, kemudian intervensi internasional yang memang bertujuan memecah belah untuk mengambil keuntungan, sedangkan yang terakhir adalah demoralisasi Tentara dan Polisi dalam bentuk pupusnya keyakinan makna pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Bhayangkari Negara, perlu diingat eks Menlu USA 1975 Henry Kissinger "The third war is not the nuclear war, but subversive war".

Bila dicermati gerakan pemisahan diri sebenarnya sering tidak berangkat dari idealisme untuk berdiri sendiri, bebas dari ikatan wilayah sebuah negara. Dorongan untuk berdiri sendiri dan berkeinginan memisahkan diri sering muncul akibat dari ketidakpuasan yang mendasar, terhadap bagaimana pemerintah pusat atau "sang mayoritas" memperlakukan sebuah wilayah atau kelompok minoritas. Issue-issue sentral yang kerap muncul lazimnya berkisar pada hubungan daerah-daerah, masalah otonomi daerah, keadilan sosial, keseimbangan pembangunan, pemerataan dan hal-hal yang sejenis.

Jika terdengar protes keras dari Aceh dan Irian Jaya, yang mematok harga mati "merdeka" setelah Timor Timur terlepas dari pangkuan Ibu Pertiwi.

Dan pada skala yang lebih kecil dari berbagai tuntutan daerah yang lain, seperti Riau, Maluku, Kalimantan dan Madura, harus kita lihat secara jernih dan arif. Adalah benar bahwa pemerintah dan bangsa Indonesia tidak akan pernah memberikan toleransi kepada salah satu wilayahnya untuk memisahkan diri.

Kedaulatan dan kehormatan bangsa tentu harus kita pertaruhkan, dan segala harga harus kita bayar guna menghentikan kegiatan pemisahan diri.

Membandingkan dengan negara lain pun semisal Malaysia tidak akan pernah menyetujui jika Sabah memilih berdiri sendiri. Amerika Serikat pun tentu akan menggunakan militernya jika tiba-tiba Alaska dan Hawaii ingin melepaskan diri dari perserikatan.

Menhan Mahfud MD (Media Indonesia 14-3-2001) menegaskan :

"Integritas wilayah harus dijaga, seumpama kita mendukung, jangan mengancam untuk merdeka atau seumpama menolak, orang juga jangan mengancam untuk merdeka. Kita boleh berdemokrasi untuk mengemukakan apa saja. Tapi soal integritas wilayah jangan diganggu". (Sari Amanat Presiden Soekarno pada peresmian Lembaga Pertahanan Nasional di Istana Negara, Jakarta tanggal 20 Mei 1965) cuplikannya berbunyi : Ketua Mao Ze Dong dan Presiden Ho Chi Minh : *The best school for defence is the school of life, The best school for defence is the school of life.* Mempergunakan apa yang dialami dalam hidupnya rakyat sendiri, bukan karena textbook direction dari luar negeri. Kalau musuh menentukan "A" kita menentukan "B", kalau musuh sedang diam hantamlah dia, kalau musuh sedang lari kejarlah dia, kalau musuh mengejar engkau larilah. Maka oleh karena itu ketahuilah kondisi tanah air kita, geo politik tanah air kita, pengetahuan keadaan segala sesuatu yang berhubungan dengan geografisehe constellatie sesuatu Negeri.

Namun sudah saatnya kita mendengar lebih sungguh-sungguh keluhan, tuntutan dan aspirasi saudara-saudara kita di Aceh dan Irian Jaya, yang pilihan merdeka adalah harga mati- serta daerah lain dengan tuntutan kemerdekaan

ada skala yang lebih lunak dan bernuansa bargaining politik praktis semata. Kebijakan otonomi daerah yang sebenarnya adalah pelayanan publik dan keadilan masyarakat serta aparat pemerintah daerah, mengacu kepada kesetaraan sehingga timbul rasa kebangsaan, demokrasi, dan kesejahteraan masyarakat demi kemandirian daerah itu sendiri. Tetapi kondisi aktual nampak kecenderungan penyimpangan yang berhubungan dengan kesetaraan dan demokrasi sehingga cukup mengganggu rasa kebangsaan. Padahal persyaratan demokrasi menuntut keharusan memiliki kesadaran berbangsa dan nasionalisme yang tinggi, kebesaran jiwa dan sportif, konstitusional dan menjaminnya kesejahteraan yang memadai bagi rakyat serta bebas dari campur tangan asing. Sementara dilain pihak gerakan separatisme seperti Aceh Merdeka dan Organisasi Papua Merdeka dalam perjuangannya untuk mencapai kemerdekaan tetap menggelar front bersenjata, front klandestine dan front politik dimana masyarakat dalam wilayah menjadi ajang perebutan.

Marilah kita lihat potret pembangunan di wilayah itu, marilah kita evaluasi kebijakan dan perlakuan terhadap masyarakat itu. Apakah telah benar-benar menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat daerah. Apakah terjadi keseimbangan dan ketepatan pengelola yang sebenar-benarnya, bagaimana pendekatan kepada yang benar-benar separatisme dengan merdeka "*sebagai harga mati*" dan pemisahan diri yang bernuansa bargaining politik praktis serta aksi-aksi benturan massa yang bernuansa SARA dan nampak sengaja diciptakan, kalau jawabannya, ya, amat kecil kemungkinannya mereka meronta dan berteriak, dengan jatuhnya korban sia-sia dalam jumlah ribuan nyawa.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Makalah ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai fenomena keinginan beberapa daerah untuk memisahkan diri dari ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan permasalahan yang melatarbelakangi serta konsep, kebijaksanaan dan strategi untuk mencegahnya sebagai dasar pertimbangan dalam penetapan kebijaksanaan nasional.

b. Tujuan

Adapun tujuannya adalah sebagai sumbang saran pemikiran penulis dan untuk kajian lebih lanjut tentang keinginan beberapa daerah untuk memisahkan diri demi tegaknya NKRI, dalam perumusan kebijaksanaan Pembangunan Nasional.

3. Ruang Lingkup dan Sistematika

a. Ruang Lingkup

Ruang lingkup naskah ini membahas mengenai fakta dan fenomena keinginan beberapa daerah untuk memisahkan diri dan upaya pencegahannya demi tegak utuhnya NKRI.

b. Sistematika

Adapun pembahasan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Membahas tentang Pokok-Pokok Pikiran yang melatarbelakangi keinginan beberapa daerah untuk memisahkan diri, permasalahan yang dihadapi.

BAB II LANDASAN PEMIKIRAN DAN PERSPEKTIF TEORI

Membahas tentang acuan pemecahan masalah-masalah nasional melalui pendekatan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional serta berbagai macam teori dan fakta aktual di lapangan yang mendukung yaitu faham merdeka, kebijakan otonomi daerah dan faham politik praktis yang memanfaatkan issue SARA.

**BAB III FENOMENA AKTUAL KEINGINAN BEBERAPA DAERAH
UNTUK MEMISAHKAN DIRI**

Membahas tentang latar belakang munculnya, analisa sebab dan akibat yang ditimbulkan dan pengalaman di masa lalu dalam menyikapi separatisme, keinginan beberapa daerah untuk memisahkan diri dari NKRI dan kegiatan politik praktis dengan memanfaatkan issue SARA.

**BAB IV PENGARUH PERKEMBANGAN LINGKUNGAN
STRATEGIS**

Membahas tentang kecenderungan yang berkembang dalam lingkungan strategis, baik secara eksternal yang mencakup lingkungan global/internasional maupun internal yang mencakup lingkungan nasional dan lokal sehingga dapat diidentifikasi peluang dan kendalanya.

BAB V NKRI DAN TANTANGAN MASA DEPAN

Membahas tentang NKRI ditinjau dari kesejarahan, tantangan global dan reformasi serta pokok-pokok permasalahan yang dihadapi mengandung nilai-nilai harapan.

BAB VI KONSEPSI MENCEGAH KEINGINAN BEBERAPA DAERAH UNTUK MEMISAHKAN DIRI DEMI TEGAK UTUHNYA NKRI

Membahas tentang kebijaksanaan dan strategi yang harus dilakukan untuk mencegah keinginan beberapa daerah untuk memisahkan diri dari pangkuan wilayah NKRI, dengan analisis prospektif teori pragmatis dihubungkan dengan Astragata.

BAB VII PENUTUP

Membahas tentang kesimpulan dan saran-saran sebagai konklusi dari makalah.

4. Metode dan Pendekatan

Penulisan makalah ini menggunakan metode deskriptif analisis melalui pendekatan kepustakaan serta empiris analisis dengan pisau analisa Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.

5. Pengertian-pengertian :

- a. *Integrasi Nasional* adalah proses penyatuan berbagai kehidupan nasional meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan Hankam keadaan kesatuan wilayah dan pembentukan suatu identitas nasional.
- b. *Separatis* adalah orang (golongan) yang memakai paham golongan (bangsa) untuk mendapat dukungan yang bertujuan memisahkan diri dari golongan (bangsa).
- c. *Faham/ide separatis* adalah ide/niat/kemauan seseorang (golongan) yang menggunakan paham memecah belah persatuan golongan (bangsa) untuk mendapatkan dukungan yang bertujuan memisahkan diri dari golongan (bangsa/negara).
- d. *Separatis di Indonesia* adalah pemikiran-pemikiran atau sikap-sikap mengagung-agungkan daerah atau suku tanpa pemikiran kepentingan daerah atau suku-suku yang lain serta tidak menyetujui ideologi Pancasila dan menghendaki pemisahan diri dari Negara Republik Indonesia.
- e. *Suku (bangsa)* adalah persatuan sosial yang dapat dibedakan dari kesatuan sosial lainnya berdasarkan kesadaran akan identitas perbedaan kebudayaan khususnya bahasa.
- f. *Ras (etnis)* adalah penggolongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik, keturunan dan rumpun bangsa.
- g. *Negara berkembang*. Negara-negara berkembang (developing countries) adalah negara dengan bidang ekonomi dan khususnya industri

yang belum berkembang, sehingga standar hidup atau pendapatan perkapita masih rendah. Ciri khasnya, antara lain ; penambahan penduduk tinggi, sektor pertanian masih dominan tanpa sektor pengolahan hasil bumi yang seimbang, sektor industri belum berkembang dalam arti diversifikasi, ongkos produksi mahal, investasi, produktivitas, semangat wirawisata dan mutu lembaga pendidikan serta kesehatan masih rendah.

h. *Otonomi Daerah*. Hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

i. *Politik*. 1. Perkataan "politik" berasal dari bahasa Yunani dan diambil alih oleh banyak bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Pada zaman klasik Yunani, negara atau lebih tepat negara-kota disebut "polis". Plato (\pm 347 sebelum Masehi) menamakan bukunya tentang soal-soal kenegaraan *Politeia*, dan muridnya bernama Aristoteles (\pm 322 sebelum Masehi) menyebut karangannya tentang soal-soal kenegaraan *Politikon*. Maka "politik" memperoleh arti seni mengatur dan mengurus negara dan ilmu kenegaraan. Politik mencakup kebijaksanaan/tindakan yang bermaksud mengambil bagian dalam urusan kenegaraan/pemerintahan termasuk yang menyangkut penetapan bentuk, tugas dan lingkup urusan negara. Mengurus negara/pemerintahan dapat dijalankan dengan cara, aturan dan hukum yang berbeda-beda, misalnya secara demokratis, liberal, otoriter, diktatorial, machiavelistis atau etis. Menjadi bahan

perdebatan apakah politik praktis ini bersifat meta-etis (artinya tidak terikat pada norma-norma etika) atau harus tunduk kepada norma-norma yang lebih luhur daripada keberhasilan dan kekuasaan saja, misalnya pada hukum keadilan, agama atau kepentingan bersama rakyat maupun umat manusia seluruhnya ; 2. Pada umumnya politik mencakup beraneka macam kegiatan dalam suatu sistem masyarakat yang terorganisikan (terutama negara), yang menyangkut pengambilan keputusan baik mengenai tujuan-tujuan sistem itu sendiri maupun mengenai pelaksanaannya.

j. *Merdeka.* Sansakerta Mahardhika berarti "sangat berjaya" berkuasa atau bijaksana. Dalam bahasa Melayu "merdeka" memperoleh arti "bebas", maksudnya "bukan budak" dan akhirnya "kebebasan politis". Demikian J. Gonda dalam "Sankrit in Indonesia". "Merdeka berarti lepas dari segala ikatan yang tidak layak (unsur negatif), sehingga menjadi bebas untuk menentukan nasib sendiri demi yang baik (unsur positif). Tidak terikat, tidak tergantung kepada orang atau pihak tertentu ; leluasa.

k. *Demokrasi.* Sistem kenegaraan yang dilakukan oleh rakyat atau yang mengatasnamakan rakyat. Pendapat Plato dan Aristoteles : Hati-hati dengan demokrasi, karena disamping sangat baik juga dapat sangat kejam, karena bisa bersekutu dengan otoriter dan dapat menimbulkan anarkis (kecenderungan bagi negara berkembang).

BAB II

LANDASAN PEMIKIRAN DAN PERSPEKTIF TEORI

6. Umum

Didalam strata pemikiran Ketahanan Nasional maka berangkat dari Wawasan Nusantara yang berisikan geo politik Indonesia, persatuan bangsa dan kesatuan wilayah serta kepentingan nasional mengatasi konflik kepentingan intern dan ekstern, sedangkan geo strategis adalah memanfaatkan geografi dengan segala isi dan penduduk, tentunya dihubungkan dengan sejarah perjuangan bangsa dalam kemampuannya mempertahankan eksistensi bangsa dan negara dalam wujud perang wilayah, pembangunan semesta berencana demi kehidupan nasional yang terintegrasi berisi keuletan dan ketangguhan, untuk mencapai negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Tersebut diatas sangat dipengaruhi oleh visi, misi dan strategi yang diimplementasikan pada leadership dan manajemen kenegaraan. Pada era Soekarno ada thema politik "*revolusi belum selesai*" dan dibingkai dengan semangat anti imperialisme serta kapitalisme, pada era Soeharto ada thema politik "*pembangunan nasional dan modernisasi*" dibingkai dengan pelaksanaan demokrasi Pancasila, pada era BJ. Habibie yang seumur jagung dikenal "*Timor Timur lepas dari pangkuan Ibu Pertiwi*", pada era Abdurahman Wahid themanya adalah "*demokrasi dan demokrasi*" yang disertai dengan reformasi dimana fenomena global dan regional amat sangat berpengaruh.

Sejak awal 1998 dan kemudian hampir dua tahu sesudahnya, ada dua peristiwa dan realitas besar di negeri ini. *Pertama*, bangsa Indonesia mengalami krisis nasional yang luas dan dalam. Seperti kita ketahui bersama, yang semula krisis ini berupa krisis moneter akhirnya meluas menjadi krisis ekonomi, krisis politik, krisis sosial dan krisis kepercayaan yang saling kait mengkait satu sama lain. *Kedua*, jika secara kondisional bangsa Indonesia terjatuh dalam krisis, dalam tataran intelektual, politis dan ideologis muncul gerakan pencerahan, pembebasan dan dalam batas-batas tertentu perlawanan. Seraya menyalahkan pemerintah dan tatanan masa lalu, tumbuh gerakan yang amat kuat untuk melakukan perubahan dan pembaharuan pada hampir semua bidang kehidupan bangsa. Gerakan nasional inilah yang selanjutnya kita kenal dengan nama *reformasi*.

Kita segera menyadari, bahwa ada yang salah di negeri ini. Betapa tidak. Indonesia yang bertanah air luas dan berpenduduk besar, Indonesia yang berkecukupan akan sumber daya alam, dan Indonesia yang telah memiliki tingkat kemajuan dan pertumbuhan ekonomi yang mengesankan, tiba-tiba terjatuh dalam krisis ekonomi yang sangat menyakitkan.

Indonesia yang dikenal dengan kehidupan politiknya yang stabil, sehat dan dinamis, yang justru kondisi politik ini amat menunjang keberhasilan pembangunan ekonomi, tiba-tiba mengalami konflik dan perpecahan politik yang dahsyat. Dan Indonesia yang dinilai memiliki solidaritas dan kesetiakawanan yang tinggi, serta memiliki harmoni dan kohesi sosial yang relatif kuat padahal bangsa ini amat majemuk baik dari segi agama, suku, ras dan golongan, tiba-tiba

bangunan sosial ini runtuh dan tercabik-cabik. Belum lagi hilangnya rasa saling percaya, sikap bersaudara dan saling bantu, yang kesemuanya bagai mengalir dan berakhir dalam sebuah muara kehidupan bangsa yang seolah kehilangan kepribadian, lemah, terpecah, susah serta kehilangan visi dan masa depannya.

Benar-benar ada yang salah di negeri ini. Kita harus sadar, jika bangsa Indonesia tidak segera dapat memposisikan dirinya dan kemudian menemukan arah perjalanannya kembali, masa depan kita sungguh akan suram. Kita juga harus melakukan pencerahan atas konsep dan pilihan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di ujung abad ke 21 ini. Kiranya Gatra Pertahanan Keamanan, Gatra Politik, Gatra Ideologi dan Gatra Ekonomi merupakan urutan prioritas dalam konsepsi pembenahannya, masih segar dalam ingatan kita tentang beberapa kebijaksanaan yang ditempuh pemerintah dalam menyesuaikan era demokrasi dengan penegakkan hukum dan HAM, dibebaskannya mendirikan partai politik sehingga menjadi sistem multi partai dan bahkan beberapa tidak mencantumkan Pancasila sebagai azas dari partai yang didirikannya, dimana serta merta semua Tapol dan Napol bahkan eks pembunuh-pembunuh dari pihak separatisme menjadi bebas merdeka apalagi eks G.30 S/PKI yang kemudian sangat aktif membentuk yayasan-yayasan dalam rangka penghujatan, pemutar balikan fakta, dan tuntutan ganti rugi perlakuan pada masa lalunya, sementara kita fahami bersama tentang perjuangan ideologi komunis yang tidak mengenal istilah kata mati, hanya pasang surut perjuangannya saja. Kemudian tentang diputuskannya pemisahan Polri dan TNI yang merupakan konsepsi mengutamakan hukum dan HAM, namun justru

dampaknya di lapangan dalam mengatasi konflik vertikal dan horizontal terjadi stagnasi dan kegamangan sehingga penanganan situasi menjadi serba terlambat dan korban jiwa dan harta benda cukup memperhatikan.

7. Hal-hal yang mendasari

a. Wawasan Nusantara.

Sebagai bangsa majemuk yang telah bernegara, Bangsa Indonesia dalam membina dan membangun/menyelenggarakan kehidupan nasional, baik aspek politik, ekonomi, Sosbud maupun Hankam selalu mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah. Untuk itu bangsa Indonesia dalam membina dan menyelenggarakan tata kehidupan bangsa dan negara dalam semua aspek seperti di atas disusun atas dasar hubungan timbal balik antara falsafah, cita-cita dan tujuan nasional, kondisi sosial budaya serta pengalaman sejarahnya yang menumbuhkan kesadaran tentang kemajemukan dan kebhinekaannya, serta mengutamakan persatuan dan kesatuan nasional.

Gagasan untuk menjamin persatuan dan kesatuan dalam kebhinekaan tersebut merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya, dikenal dengan istilah Wawasan Kebangsaan dan Wawasan Nasional Indonesia yang diberi nama Wawasan Nusantara disingkat "Wasantara".

Konsep Wawasan Nusantara mengandung / terdiri dari 3 (tiga) unsur dasar ialah Wadah (contour), Isi (content) dan tata laku (conduct).

1) Wadah (Contour)

Wadah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara meliputi seluruh wilayah Indonesia yang memiliki sifat serba Nusantara dengan kekayaan alam dan penduduk serta aneka ragam budaya ialah bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Setelah menegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, bangsa Indonesia memiliki organisasi kenegaraan yang merupakan wadah berbagai kegiatan kenegaraan dalam wujud supra struktur politik, sedangkan wadah dalam kehidupan bermasyarakat adalah berbagai kelembagaan dalam wujud infra struktur politik.

2) Isi (Content)

"Isi" adalah aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945. Menyadari bahwa untuk mencapai aspirasi yang berkembang di masyarakat maupun cita-cita dan tujuan nasional seperti tersebut di atas bangsa Indonesia harus mampu menciptakan persatuan dan kesatuan dalam kebhinekaan dalam kehidupan nasional yang berupa politik, ekonomi, sosial budaya dan Hankam. Oleh karena itu "isi" menyangkut dua hal yang esensial, yakni :

- a) Realisasi aspirasi bangsa sebagai kesepakatan bersama, dan perwujudan, pencapaian cita-cita dan tujuan nasional.
 - b) Persatuan dan kesatuan dalam kebhinekaan yang meliputi semua aspek kehidupan nasional.
- 3) Tata Laku (Conduct)

"Tata laku" merupakan hasil interaksi antara "wadah" dan "isi" yang terdiri dari tata laku bathiniah dan lahiriah. Tata laku bathiniah mencerminkan jiwa, semangat dan mentalitas yang baik dari bangsa Indonesia, sedangkan tata laku lahiriah tercermin dalam tindakan, perbuatan dan perilaku dari bangsa Indonesia, yang kedua hal tersebut akan mencerminkan identitas jati diri atau kepribadian bangsa Indonesia berdasarkan kekeluargaan dan kebersamaan yang memiliki rasa bangga dan cinta terhadap bangsa dan tanah airnya sehingga menimbulkan nasionalisme yang tinggi dalam semua aspek kehidupan nasional.

b. Ketahanan Nasional

Menyadari keadaan masyarakat Indonesia yang majemuk dan terkotak-kotak, maka sejak Orde Baru landasan penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dikembalikan secara murni dan konsekuen kepada Pancasila dan UUD 1945, terutama dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan melalui pembangunan

nasional. Agar pembangunan nasional tidak menyimpang dari landasannya, diperlukan pedoman dasar yang dapat mempersatukan pola pikir, pola sikap dan pola tindak yang sama, demi terwujudnya Cita-cita Nasional melalui pencapaian Tujuan Nasional. Dalam hubungan itu dikaji kembali tentang posisi geografi yang dikaitkan dengan tinjauan politik, dipelajari lagi budaya bangsa untuk dapat memahami nilai-nilai pandang luhur, serta ditelusuri pula sejarah bangsa guna dapat memperbaiki pengalaman yang kurang menguntungkan dan memanfaatkan pengalaman yang baik dalam mempersatukan cara pandang bangsa Indonesia dapat mempertahankan dan melangsungkan kehidupannya di tengah-tengah bangsa lainnya di dunia yang selalu berubah. Cara pandang yang demikian akan dapat melandasi perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan nasionalnya, serta merupakan pedoman bagi pengelolaan segenap aspek kehidupan nasional secara utuh, menyeluruh dan terpadu. Pancasila dan UUD 1945 akan dapat diimplementasikan dalam kehidupan nasional, apabila berjalan dalam suatu landasan yang mempersyaratkan persatuan dan kesatuan yang dirumuskan dalam suatu konsepsi cara pandang bangsa Indonesia.

Wasantara merupakan pancaran falsafah dan ideologi Pancasila serta UUD 1945, pada hakekatnya adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, baik arah pandang ke dalam sebagai satu kesatuan, persatuan dan pemerataan di dalam seluruh aspek kehidupan nasional, maupun arah pandang ke luar yang

menitikberatkan pada perdamaian, kemerdekaan dan keadilan sosial di dalam lingkungan pergaulan dunia.

Perwujudan (manifestasi) Wawasan Nusantara sebagai Wawasan Nasional Indonesia merupakan kondisi ideal yang dijadikan sumber aspirasi dalam keberadaannya atau eksistensinya yang merdeka, berdaulat dan bermartabat. Oleh karena itu Wawasan Nasional memiliki identitas yang khas dalam hakekatnya menjiwai tindak kebijaksanaan suatu bangsa dalam mencapai tujuan nasionalnya.

Dalam perjuangan mencapai tujuan nasional tersebut, suatu bangsa senantiasa akan menghadapi berbagai tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan dari manapun datangnya baik dari dalam maupun dari luar, sehingga diperlukan keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional yang disebut Ketahanan Nasional. Rumusan Ketahanan Nasional sebagai suatu pengertian baku, sangat diperlukan dalam menghadapi dinamika perkembangan dunia dari masa ke masa, untuk dipakai sebagai dasar atau titik tolak dalam penjabarannya.

1) Pengertian Ketahanan Nasional Indonesia

Ketahanan Nasional Indonesia adalah kondisi dinamika bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman,

Kesejahteraan dapat digambarkan sebagai kemampuan bangsa dalam menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai nasionalnya, demi sebesar-besar kemakmuran yang adil dan merata, rohaniyah dan jasmaniah. Sedangkan keamanan adalah kemampuan bangsa melindungi nilai-nilai nasionalnya terhadap ancaman dari dalam maupun dari luar.

3) Hakikat Tannas dan Konsepsi Tannas Indonesia

Hakekat Ketahanan Nasional Indonesia adalah keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, untuk dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam mencapai tujuan nasional.

Untuk mewujudkan cita-cita nasional dan mencapai tujuan nasional, bangsa Indonesia selain memerlukan cara pandang yang dinamakan Wawasan Nusantara, juga perlu membina keuletan dan ketangguhan yang menanggung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional yang dinamakan Ketahanan Nasional.

8. Prespektif Teori

a. Faham Merdeka

Jeritan untuk kemerdekaan, menangkap sesuatu dari hati manusia yang paling besar dan mendalam. Dalam tulisan ini akan terasa kekuatan yang amat menonjol adalah ajakan untuk merefleksikan nilai dasar

kemanusiaan yaitu kebebasan itu sesuatu yang hakiki dalam kehidupan manusia. Kebebasan macam apa yang sebenarnya ingin kita tumbuhkan atau yang harus dipelihara dan dijaga.

Jika membicarakan "Kebebasan" orang cenderung terbawa arus emosi atau berada dalam atmosfer "keseenakannya sendiri" yang bercorak "ukuran" dan milik kaum muda yang serba menuntut. Hal ini mengingatkan kita akan kaum urakan yang berkemah di Parangtritis yang dimotori oleh Bengkel Teaternya Rendra pada tahun 1971. Mereka berkemah dengan memberikan tekanan dan diciptakan iklim "bebas", yang katanya milik para pemuda dan remaja. Namun yang menarik dan menjadi catatan Rendra serta penting untuk dipelajari bila kebebasan ingin digelar adalah : setiap keadaan ada aksesnya. Perkemahan kaum urakan pun sudah diperhitungkan akses dari suasana bebas dengan hati yang cukup berdebar-debar. Acara dibuka bebas untuk diikuti oleh siapa saja dan oleh karena itu juga bebas dimasuki oleh pengacau yang menyalahgunakan kebebasan suasana. Untuk mengatasi akses semacam itulah maka perlu dari semula sudah ditegakkan suasana bertanggung jawab kepada diri sendiri. Anggota Bengkel Teater sebagai pendorongnya. Mereka mendorong tidak dengan nasehat-nasehat atau susunan peraturan-peraturan, tetapi dengan contoh dan tindak tanduk. Tindak tanduk mereka harus menunjukkan bahwa mereka sangat hormat pada tanggung jawab dan bersikap dingin terhadap godaan anarki. Sementara itu mereka memperlihatkan kebebasan di dalam gerak-gerik.

Ternyata dengan cara ini berhasil dihindarkan eksese-eksese yang serius dan ditakutkan sampai perkemahan terakhir. Bahkan melalui surat-surat, dapat disimpulkan bahwa peserta menyadari bahwa mereka belum berpartisipasi dalam menghayati kemerdekaan yang dewasa.

Selanjutnya kalau mau diperhatikan seruan atau pekik "Merdeka", amat sering diucapkan para tetua angkatan kemerdekaan (angkatan 1945) dengan muatan semangat yang gigih, kompak dan akrab dalam setiap perjumpaan di antara mereka. Sungguh membanggakan. Apakah pekik semacam itu kini sudah luntur maknanya atau sudah tidak relevan atau tidak jamannya lagi.

Bahwa kemerdekaan diberi makna politis, yaitu : kebebasan dari penjajahan oleh bangsa lain, tidak salah. Bahkan mendapat tempat terhormat "kemerdekaan adalah hak segala bangsa". Bila kemerdekaan dalam arti politis, bebas dari penjajahan sudah tercapai, tidak berarti tinggal enaknyanya atau semuanya. Kemerdekaan itu perlu dijaga, dipelihara dan dirawat. Dengan kata lain diisi agar tidak jatuh terperosok atau terjebak ke dalam keadaan "ketidakmerdekaan baru" atau "penjajahan dalam bentuk yang lain".

Dalam artian umum, kata "kebebasan" berarti "ketiadaan paksaan". Ada bermacam-macam "paksaan" dan ada bermacam-macam "kebebasan". Kebebasan fisik adalah Ketidadaan paksaan fisik. Kalau seorang tahanan ke luar dari penjara, dia menjadi bebas secara fisik. Kebebasan moral adalah ketiadaan paksaan moral hukum atau

kewajiban. Misalnya, di Inggris orang bebas secara moral untuk mengkritik pemerintah. Tidak ada paksaan, hukum atau keharusan apa pun yang melarang hal itu.

Kebebasan psikologis adalah Ketiadaan paksaan psikologis. Suatu paksaan psikologis berupa kecenderungan-kecenderungan yang memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu atau sebaliknya membuatnya tidak mungkin untuk melakukan beberapa kegiatan tertentu. Seekor anjing yang lapar (tidak terlatih) dipaksa oleh rasa laparnya untuk memakan apa saja makanan yang diberikan kepadanya. Binatang dipaksa berbuat demikian oleh pengaruh yang menekan dari kecenderungan-kecenderungan mereka. Bicara psikologis, binatang tidak bebas, sebaliknya, manusia yang lapar dapat menahan diri untuk tidak makan. Seorang prajurit yang dihantui perasaan takut oleh ledakan bom, mempunyai kesanggupan untuk tetap berada di markas atau posnya. Manusia secara psikologis bebas.

Kebebasan psikologis disebut juga kebebasan untuk memilih, karena kebebasan itulah yang dimungkinkan subyek memilih, antara berbagai tindakan yang mungkin orang menyebutnya juga sebagai kualitas kehendak, yang dapat berbuat atau tidak berbuat (kebebasan berbuat), atau berbuat dengan cara begini atau begitu (kebebasan spesifikasi). Dan tiap kali kebebasan kehendak manusia dibicarakan kebebasan psikologis itulah yang dimaksudkan.

Beberapa pemikir modern dan ahli psikologis mengingkari kebebasan kehendak itu. Sistem mereka dikenal dengan nama "determinisme". Mereka berkata bahwa, meskipun tampak bebas, manusia itu "ditentukan", dipaksa, dan dikekang dalam segala perbuatannya.

1) Alasan Persetujuan Umum

Sebagian besar manusia percaya bahwa mereka dilengkapi dengan kehendak yang bebas. Dan keyakinan itu sangat penting bagi keseluruhan hidup manusia. Maka dari itu, seandainya ada keteraturan dalam dunia, pandangan sebagian besar manusia itu tidak mungkin keliru. Jadi orang dapat menyimpulkan bahwa kehendak manusia adalah bebas.

Pendapat umum mengatakan adanya kebebasan itu. Orang biasa yakin bahwa ia bebas dan bahwa lingkungannya juga bebas. Determinisme hanya dinyatakan dalam teori saja, tidak pernah dalam praktek.

2) Alasan Psikologis

Perlu digarisbawahi bahwa sebagian besar manusia secara spontan menyadari kebebasan. Dari manakah datangnya keyakinan semacam itu? Itu adalah hasil dari pengalaman. Tiap hari kita mengalami bahwa kita bebas, paling tidak sampai batas tertentu. Secara langsung dan tidak langsung disadari hal ini.

Pertama secara langsung persis dalam tindakan untuk memutuskan sesuatu. Lalu secara tak langsung berdasarkan berbagai keadaan yang mengiringi tingkah laku manusia dan yang tak bisa dimengerti tanpa adanya kebebasan.

3) Alasan Etik.

Seandainya tidak ada kebebasan, tidak akan ada juga tanggung jawab moral, kebajikan, jasa, keharusan moral, kewajiban. Hubungan yang kuat antara salah satu tugas dari etik adalah memperhatikannya. Alasan itu sangat kuat, karena rasa kewajiban moral adalah sangat wajar pada manusia. Bahkan mereka yang menyangkal realitas-realitas itu dalam teori berkelakuan dalam kehidupan konkrit seakan-akan realitas-realitas itu memang ada.

Diantara prinsip-prinsip pertama yang tak terpisahkan dari jiwa manusia, setidaknya ada satu yang mengenai bidang moral : "Harus berbuat baik dan menghindari yang buruk". Ungkapan azasi dari suara hati itu "harus" moral itu, adalah pembawaan di dalam setiap jiwa manusia. Ini adalah dasar kewajiban moral dan mengandung arti kebebasan kehendak, karena kewajiban moral justru adalah untuk berbuat sesuatu secara bebas.

Tidak akan ada kehidupan sosial pun tanpa adanya keharusan dan kewajiban. Dalam hubungan kita dengan orang-

orang lain, kita sadar akan keharusan-keharusan tertentu yang kita punyai terhadap mereka. Sama halnya bahwa kita sadar akan keharusan-keharusan yang mereka miliki terhadap kita. Jadi kita menganggap secara umum bahwa manusia bebas. Kewajiban moral mengandaikan adanya kebebasan. Kewajiban moral adalah syarat subyek-subyek batas itu sendiri.

4) Alasan Empiris Analisis.

a) Separatisme Timor Timur.

Perjuangan Fretilin pada tahun 1975 yang berideologi Komunis mampu mengalahkan kekuatan UDT (Nasionalis) dan Opodeti (berintegrasi dengan syarat). Pada era ± 1975 s.d. 1985 kekuatan front bersenjata Fretilin hancur dan berlanjut dengan aksi gerilya di hutan-hutan, ± 1986 Fretilin menggunakan strategi menghindari kehancuran total dan melakukan kontak damai yang dimanfaatkan untuk membentuk front klandestine dan konsolidasi front politik (strategi Komunis) ditransfer kedalam strategi nasionalista dan memanfaatkan keterbukaan Timor Timur serta dukungan internasional. Pada ± 1990 front bersenjata sangat kecil, front klandestine dan front politik mulai melebar dan muncul front baru penggalangan massa dengan thema anti integrasi dengan kemerdekaan penuh bagi Timor Timur. Efek globalisasi, issue hukum dan HAM nampak semakin

berpengaruh. Pada ± 1990 sampai lepasnya Timor Timur ke empat front menyatu dengan thema anti integrasi melawan front pro integrasi yang didukung TNI sehingga polarisasi kekuatan nampak jelas. Globalisasi, kondisi dalam negeri, keputusan tentang referendum oleh BJ. Habiebie, dukungan internasional kepada anti integrasi mempercepat proses lepasnya Timor Timur dari propinsi ke 27. Tetapi permasalahan pengungsi dan kemelut intern dalam persiapannya untuk menjadi Negara Timor Leste masih menyimpan segudang masalah.

b) Separatisme GAM Aceh.

Mempunyai strategi yang mirip dengan perjuangan kemerdekaan Timor Timur dalam hal penggelaran front separatisme. Setelah Daud Beureruh dengan faham DI/TII untuk menjadikan Aceh sebagai negara Islam dapat dinetralisir, maka kelanjutan perjuangan sebagian rakyat Aceh yang dipimpin Hasan Tiro jelas merupakan separatisme dengan tujuan merdeka sebagai harga mati. Situasi terakhir front bersenjata semakin kuat, front klandestin dan front politik semakin aktif dan front penggalangan massa mampu menghimpun kekuatan massa dimana masyarakat kondisinya serba salah, serba ketakutan dan serba kekurangan. Pola penanganan yang

mengedepankan aparat penegak hukum dan Kamtibmas serta strategi mengutamakan perundingan nampaknya di bawah pengaruh keinginan separatis GAM, seperti menginternasionalisasikan gerakan GAM, membentuk kesepakatan yang menguntungkan separatis GAM, dan situasi terakhir mampu menciptakan zona damai atau kantong-kantong yang digunakan untuk basis gerakan. daerah konsolidasi menghindari pengejaran dan penghancuran, serta menunjukkan kekuasaan mutlak di bawah kendali separatis GAM (daerah Lhok Seumawe dan Biruen). Kiranya sikap arif dan tegas dari pemerintah untuk menetralsir separatisme GAM masih ditunggu realisasinya oleh segenap komponen bangsa yang mencintai NKRI.

c) Separatisme OPM Irja.

Lintasan sejarah gerakan separatisme OPM Irja relatif sama dengan menggelar empat front perjuangan, tetapi penonjolannya sering melakukan penyanderaan-penyanderaan dan serangan yang mengandalkan kekuatan massa besar. Kondisi terakhir front bersenjata masih klasik yaitu lemah dan tidak terkoordinir, front politik dan front klandestine tetap aktif dengan thema aksi damai, front penggalangan massa telah mampu membentuk Satgas OPM dalam jumlah besar \pm 15.000 orang tersebar sehingga

cukup menekan kekuatan dari para eks pejuang Irja yang tergabung dalam Satgas Merah Putih. Strategi mengatasi gerakan separatisme yang menggunakan thema gerakan damai, gerakan anti kekerasan nampaknya cukup menarik simpati dilain pihak cukup merepotkan aparat keamanan.

b. Faham Kebijakan Otonomi Daerah.

Dalam pelaksanaan ketatanegaraan Indonesia bahwa pasang surut pelaksana otonomi daerah telah mengikuti landasan-landasan / keadaan pemerintahan saat itu.

Pada awal Republik ini berdiri penjabaran Pasal 18 UUD 1945, untuk pertama kali dikeluarkan UU No.1 Tahun 1945 tanggal 23 Nopember 1945 yang mengatur tentang kedudukan Komite Nasional Daerah (KND) menjadi Badan Perwakilan Rakyat Daerah. Badan ini bersama-sama dengan dan dipimpin oleh Kepala Daerah menjalankan pekerjaan mengatur Rumah Tangga Daerahnya (Pasal 2). Suasana saat itu terutama tekanan Belanda, UU No. 1/1945 tidak dapat dilaksanakan dengan baik.

Pada tahun 1948 pemerintah berhasil meluncurkan UU No.22 Tahun 1948 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-Undang tersebut telah secara tegas menyebut kewenangan urusan rumah tangga daerah yang terdiri dari hak otonomi dan hak made bewind. Kemudian tahun 1957 keluar UU No.1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintah Daerah yang disusun berdasarkan UUDS Tahun 1950.

Perbedaan yang menonjol dalam UU tersebut dibanding dengan UU sebelumnya ada kehendak politik pemerintah untuk memberikan otonomi seluas-luasnya kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya (Pasal 31 ayat 1). Sayang UU ini belum begitu dapat dilaksanakan sepenuhnya, mengingat dua tahun kemudian dikeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang memberlakukan UUD 1945 dan melalui Kepres No.6 Tahun 1959 dan Penpres No.5 Tahun 1959 telah mengubah materi UU No.1 Tahun 1957 terutama mengenai bentuk, susunan serta kekuasaan, tugas dan kewajiban pemerintah daerah. Prinsip otonomi yang riil dan seluas-luasnya tetap dianut (Pasal 21 Panpres No.6/59).

Enam tahun Penpres No. No.6/59 berjalan, pemerintah kemudian menetapkan UU No.18 Tahun 1965 sebagai pengganti UU sebelumnya. Namun secara kedudukan materi UU 18/65 merangkum pokok-pokok pikiran yang dipandang lebih progresif dari perundang-undangan sebelumnya.

Sesuai dengan kondisi dan tuntutan masyarakat saat itu, Undang-Undang No.18/1965 diganti dengan UU No.5 Tahun 1974. Dalam Undang-Undang ini istilah otonomi nyata dan seluas-luasnya tidak lagi digunakan dan diganti dengan otonomi nyata dan bertanggung jawab. UU No.5/1974 menjadi acuan utama dalam pelaksanaan otonomi daerah selama pemerintahan Orde Baru. Bentuk sosialisme, *ad vicon* pengenalan UU tersebut dilaksanakan secara masal baik pada level birokrat Pemerintah Pusat maupun Daerah termasuk ABRI (saat itu) juga Parpol

dan Ormas. Hasilnya cukup mustajab telah memberikan kekokohan dominasi kekuasaan pusat pada daerah, pada saat itu daerah dibiarkan tergantung (bukan sangat tergantung) kepada pusat dengan memanfaatkan elemen yang dikuatkan dalam pasal-pasal yang tercantum dalam UU 5/1974 tersebut.

Kalau kita simak UU tersebut sebetulnya pada prinsipnya ada karakteristik untuk meletakkan titik berat otonomi pada tingkat II, namun otonomi daerah itu lebih cenderung merupakan kewajiban untuk melaksanakan perintah-perintah pusat dari pada melaksanakan hak-hak rumah tangganya sendiri. Sehingga dengan demikian UU 5/1974 ini, meletakkan dasar titik berat otonomi daerah pada tingkat II, namun dalam pasal-pasal lain justru lebih mengatur kearah sentralisasi dan top down.

Kenapa demikian : Pertama, adanya tingkatan otonomi daerah yang sifatnya hierarchi, yaitu tingkat daerah tingkat I dan tingkat daerah tingkat II selain Desa. Kedua, akibat ada 2 tingkatan otonomi daerah dengan sendirinya segala keputusan pada level Pemda Tingkat II, tidak berhenti dan selesai diputuskan oleh Pemda Tk II, namun perlu diangkat dulu kepada level lebih tinggi, yaitu tingkat I untuk Pemda Tk II dan Pemerintah Pusat untuk Pemda Tk I. Ketiga, cenderung top down dari pada bottom up. UU No.5/1974 cenderung mengatasi dan memotong arus bawah. Pasal-pasal dalam UU tersebut mengatur bagaimana kekuasaan pusat mempunyai kewenangan untuk membatalkan Perda yang diusulkan daerah. Calon-calon Gubernur atau Bupati/Walikota, dan bahkan

kewenangan pemerintah pusat atau propinsi kepada Daerah Tingkat II, kalau itu pertimbangannya *rightman on the right place* atau pertimbangan proporsionalisme kiranya mungkin masih bisa diterima, justru menggejala koncoime, klik, kerabat yang bentuknya KKN. Keempat, inisiatif local terhenti, dengan payung UU No.5/1974 lalu melaksanakan pembangunan dengan sistem instruksi Presiden tentang Dana Bantuan Pembangunan Daerah (Dana Inpres). Sistem ini digulirkan sejak tahun 1972 dimulai pada saat-saat boom minyak. Dana disebar ke daerah berdasarkan criteria pusat, seolah-olah yang punya dana adalah pusat (apalagi yang totalnya pada saat itu "Bantuan Pembangunan Daerah". 28 tahun pelaksanaan pembangunan tersebut telah menerima babakan inisiatif daerah untuk menggali potensi/sumber daya lokal, yang terjadi sangat ketergantungan pada pemerintah pusat.

Ketika reformasi bergulir dan UU No.5/1974 diganti dengan UU No.22/1999 yang sangat progresif dan UU Pemerintah Daerah selama ini, dimana daerah dituntut mandiri, kreatif dalam menggali potensinya menjadi kelabakan, begitu pula pemerintah pusat panik karena sumber keuangan pihak-pihak yang selama ini mengalir dari daerah ke pusat akan menjadi sangat berkurang karena dibatasi oleh kewenangan otonomi daerah. Masa transisi pelaksanaan UU No.5/1974 kepada UU No.22/1999 membuat guncangan terhadap institusi-institusi baik di pusat maupun di daerah. Pemerintah pusat diharuskan merampungkan struktur kabinetnya pada hal struktur birokrasi pemerintah pusat sudah begitu

menggelembung. Di daerah sendiri dituntut harus menjadi struktur yang efisien dan efektif dengan dukungan SDM yang relatif sangat terbatas, keadaan ekonomi, sosial budaya dan bahkan Hankam pun mulai dirasakan goncangan (Irja, Ambon, Maluku, Kalbar dan Kalteng) yang kesemuanya adalah ketidak siapan kita dan memprediksi gejala sosial yang mau tidak mau terjadinya transpormasi sosial melalui arus teknologi informasi dan kebebasan yang mengglobal.

c. Faham Penciptaan Kerusuhan.

Untuk menciptakan suatu kondisi menjadi kerusuhan sosial sebagaimana yang dikehendaki diperlukan suatu proses persiapan dan perencanaan yang cukup rinci dengan pertimbangan yang matang. Sebagai upaya untuk mencapai keberhasilan yang diinginkan dalam setiap aksi kerusuhan. Langkah-langkah yang ditempuh biasanya terdiri dari :

1) Langkah pertama membangun organisasi.

Organisasi dibentuk dengan cara membangkitkan minat kaum pekerja atau masyarakat lapisan bawah yang apatis dan tidak mengetahui apa-apa tentang propaganda, kemudian diharapkan menjadi suatu jembatan yang mengarah kepada suatu bentuk kekuatan organisasi massa. Selanjutnya memluas pengaruh membuat hubungan rasa simpati dalam organisasi dan menciptakan front untuk melawan front kekuatan lain, dan

dilanjutkan melatih kader militan dan pengurus organisasi secara efektif.

2) Langkah kedua "Pre Conditioning".

Kegiatan untuk mematangkan kondisi massa yang dapat menerima garis besar rencana pendirian organisasi, indoktrinasi dan propaganda merupakan syarat yang fundamental untuk pembentukan sikap yang baru. Selanjutnya agitasi yang merupakan alat propaganda keluar ditujukan untuk mematangkan situasi agar memperbanyak pengikut dan kader. Sedangkan propaganda ditujukan pada massa sendiri untuk mempertebal dedikasi, keterikatan dan militansi mereka. Pada akhirnya propaganda yang terus menerus serta manipulasi psikologis akan membentuk semangat dan sikap tertentu terhadap massa yang pada akhirnya massa berani menerima dan mendukung sepenuhnya.

3) Langkah ketiga "Slogannering and Hate Targeting"

Pre conditioning adalah langkah pertama dalam menciptakan opini yang menyatu, pada hakekatnya antara keduanya saling mencakup. Oleh karena itu slogannering adalah alat utama untuk Pre conditioning. Tugasnya adalah untuk mencari titik lemah dan sumber ketidakpuasan, frustasi dalam masyarakat, membuat frustasi yang baru bila mungkin. Perhatian masyarakat ditujukan pada hal-hal tersebut, mengenalkan mereka untuk

bertindak radikal dan akhirnya menyatukan mereka, kenyataan sosiologis bahwa massa dalam masyarakat adalah apatis terhadap politik, untuk mendekati mereka haruslah digunakan sesuatu yang menyangkut mereka pula, sehingga dapat tercapai suatu perubahan sosial dengan cepat, tepat dan efektif.

4) Langkah keempat "Membuat Crowd/Kerusuhan"

Didalam setiap aksi massa menciptakan Crowd/Kerusuhan adalah yang paling penting yaitu menimbulkan beban bagi penegak hukum dan menimbulkan tabir dimana regu penghasut dapat menceburkan diri menjalankan tugas, menghancurkan hukum dan peraturan, sosial kontrol dan lain-lain. Membuat Crowd ini bagi organisasi radikal yang modern tidaklah begitu sukar. Sekali dapat diselundupkan kedalam organisasi massa dan dapat menjalankan propaganda dengan baik, maka keadaan sudah siap. Setelah timbul keadaan krisis dalam masyarakat maka agen setempat atas inisiatifnya sendiri dapat menggunakan alat-alat komunikasi biasanya telah cukup untuk membuat suatu Crowd. Mereka akan mengumpulkan siapa saja untuk membicarakan keluhan-keluhan yang sedih dan ketidakadilan serta eksploitasi tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap massa selama ini. Sementara itu agen yang telah diselundupkan kepada organisasi massa akan menyampaikan lagu lama "Tujuan bersama, serta berjuang untuk tujuan bersama, karena itu marilah kita bersatu". Taktik yang

berbahaya adalah (street fighting) penggunaan barikade-barikade, metoda mempersenjatai pemberontakan massa, untuk melakukan pemogokkan, demonstrasi, dan perkelahian di jalanan dimana dapat pula disewa mulai dari untuk berkabung sampai untuk demonstrasi.

5) Langkah kelima Mengendalikan Massa (On The Scene Crowd).

Sekali organisasi telah mampu mengumpulkan massa, maka masalahnya tinggal bagaimana caranya mengendalikan massa itu agar tujuan yang dicita-citakan dapat tercapai. Bila tujuan adalah kekerasan maka bagaimana caranya merubah crowd menjadi mob. Teknik yang dikembangkan dalam mengendalikan massa yang paling terorganisir adalah menggiring domba. Kontrolnya baik, rahasia, bertempat di luar massa itu sendiri dan menggunakan kurir. Adapula teknik memancing di air keruh yaitu menunggangi ketegangan sosial yang ada atau menciptakan ketegangan-ketegangan kecil. Dengan preconditioning dan propaganda secara teratur dan tepat. Dapat meningkatkan kemungkinan aksi massa dan bila telah berhasil maka keadaan yang telah dipanasi itu dapat dipastikan akan meledak dengan tidak disangka-sangka. Atau dapat pula dengan menggunakan segala bentuk kesulitan dan ketidakpuasan dalam masyarakat, lalu dipanasi sehingga meledak menjadi aksi massa.

- 6) Langkah keenam "Memancing-mancing kemarahan Polisi serta konfrontasi dengan mereka"

Manfaatnya yang paling besar adalah menarik perhatian penonton yang tercengang-cengang secara spontan, dan inilah kesempatan untuk menyampaikan slogan-slogan dan sebab-sebab dari demonstrasi itu. Makin lama makin dekat akhirnya tidak dapat dibedakan lagi mana yang penonton dan mana yang bukan. Tindakan Polisi akibatnya akan dirasakan juga oleh penonton, dan hal ini akan mempercepat ikutnya mereka yang tidak bersalah.

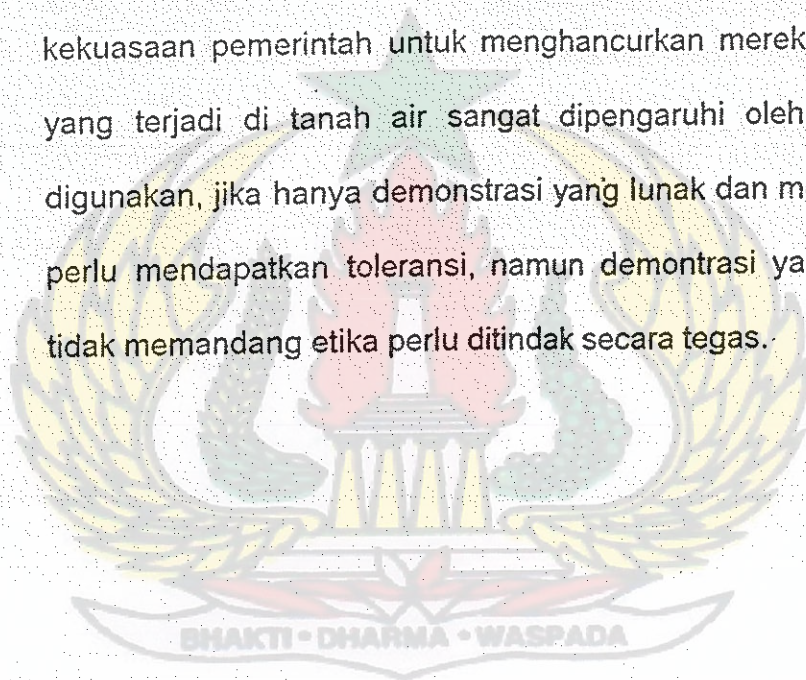
Ia juga menekankan bahwa demonstrasi haruslah diadakan seiring mungkin untuk memancing Polisi menggunakan kekerasan, karena kekerasan akan menimbulkan rasa benci terhadap pemerintah. Semakin sering demonstrasi, maka semakin besar kemungkinan terjadinya pertumpahan darah, dan inilah yang akan menimbulkan revolusi. "Kekalahan dalam demonstrasi akan berakhir dengan kemenangan absolut".

- 7) Langkah ketujuh "Menimbulkan korban"

Cara ini sejak lama dipakai untuk memanipulasi dan menghasut massa, baik orang-orang yang tak berpendidikan maupun yang berpendidikan. Prosedurnya adalah menimbulkan korban jiwa di kalangan massa rakyat, atau massa organisasi sendiri bilamana diperlukan, membawa mayatnya di jalan-jalan selama mungkin, mengadakan upacara penguburan besar-besaran

dan selanjutnya memperingati kematiannya sesering mungkin untuk memelihara suasana perjuangan.

Pada akhirnya menurut George Washington tentang tindakan anti kerusuhan berkata : "Kita harus mengetahui dengan pasti apa tujuan dari kaum perusuh/pemberontak". Bila mereka mempunyai keluhan yang benar perbaikilah mereka atau akui hak mereka dan akui ketidakmampuan kita untuk memenuhinya pada saat ini. Dan bila hal ini tidak mereka indahkan, maka gunakan kekuasaan pemerintah untuk menghancurkan mereka, sedangkan yang terjadi di tanah air sangat dipengaruhi oleh thema yang digunakan, jika hanya demonstrasi yang lunak dan memenuhi etika perlu mendapatkan toleransi, namun demonstrasi yang keras dan tidak memandang etika perlu ditindak secara tegas.



BAB III
FENOMENA AKTUAL BEBERAPA DAERAH
UNTUK MEMISAHKAN DIRI

9. Umum.

Ada beberapa pernyataan kritis yang tiba-tiba muncul belakangan ini, Apakah Indonesia akan tetap utuh? Apakah masyarakat Indonesia yang amat majemuk bisa hidup rukun? Dan, Apakah pada era reformasi, negeri kita tidak masuk pada pertikaian ideologis yang hanya akan membangkitkan rasa permusuhan ?

Kekhawatiran tentang perpecahan (disintegrasi) nasional, agaknya berangkat dari kondisi tanah air dewasa ini yang dapat digambarkan sebagai penuh konflik dan pertikaian. Gelombang reformasi yang tengah berjalan, menimbulkan berbagai kecenderungan dan realitas baru. Segala hal yang terkait dengan Orde Baru, termasuk format politik dan paradigmanya, dihujat dan dibongkar. Bermunculan pula aliansi ideologi dan politik yang ditandai menjamurnya partai-partai politik baru. Seiring dengan itu lahir sejumlah tuntutan daerah-daerah di luar Jawa agar mendapatkan otonomi yang lebih luas atau merdeka sendiri. Lebih bertambah parah, manakala diwarnai terjadinya konflik dan benturan antar etnik dengan segala permasalahannya. Sedangkan gerakan separatisme GAM dan OPM yang tetap memasang harga mati bagi kemerdekaannya merupakan persoalan tersendiri yang harus diselesaikan

Negara Kesatuan Republik Indonesia ini masih ada, walaupun kadarnya naik turun. Faham dan gerakan separatis seperti itu sebenarnya banyak penyebab yang melatarbelakangi. Ada yang karena kadar cinta tanah air (patriotisme) kurang/tipis, ada pula disebabkan oleh sakit hati, frustasi dan balas dendam, ada pula karena terbuai bujukan pihak asing, dan ada pula disebabkan oleh faktor kesenjangan, iri hati, dan ketidaksetujuan/kontra dengan pihak pemerintah.

Beberapa tindak dan faham separatis di negara kita sejak pra kemerdekaan sampai dengan saat ini sebagai berikut :

a. Pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII). Golongan ekstrim kanan ini mempunyai cita-cita ingin mendirikan Negara Islam di Indonesia (NII) yang menghendaki Syariah Islam sebagai dasar negara, dan hukum Islam sebagai hukum negara. Memang pada awal pembentukannya pada tanggal 17 Agustus 1949 oleh Sukarmaji Marjan Kartosuwiryo telah dipengaruhi oleh Belanda dengan negara bonekanya yaitu "Negara Pasundan" serta diprovokasi oleh Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) pimpinan Westerling. Mereka berkolusi untuk menghantam pasukan Siliwangi yang sedang "long mars" dari Jawa Tengah ke Jawa Barat yang merupakan kegiatan kembali dan hijrah hasil perjanjian Renville. Pemberontakan DI/TII tersebut terus berkembang dan merembet antara lain :

1) Ke Jawa Tengah bagian barat yang dipimpin oleh Amir Fatah yang telah diberi pangkat oleh Kartosuwiryo setingkat Mayor Jenderal TNI. Pasukan pemberontak ini akhirnya dapat

dihancurkan oleh pasukan Gerakan Banteng Nasional (GBN) dari Kodam Diponegoro.

2) Di Kalimantan Selatan dipimpin oleh Ibnu Hajar alias Hadiri bin Umar alias Angli. Ia adalah seorang Letda Angkatan Darat dan menamakan pasukannya sebagai Kesatuan Rakyat Yang Tertindas (KRYT) dan menyatakan bagian dari DI/TII Kartosuwiryo. Pasukan KRYT telah menyerang pos-pos Tentara di Kalimantan pada bulan Oktober 1950 s.d. Oktober 1959.

3) Di Sulawesi Selatan DI/TII dipimpin oleh Kahar Muzakar. Awal mula Kahar Muzakar adalah pejuang di Pulau Jawa, kembali ke Sulawesi Selatan menghimpun laskar-laskar gerilya diberi nama Komando Gerilya Sulawesi Selatan (KGSS) dan mengajukan agar KGSS dimasukan APRIS dengan nama Brigade Hasanudin. Oleh pemerintah usulan ditolak sebagian, yang lulus penyaringan dapat diterima di APRIS dan yang tidak lulus masuk Korps Cadangan Nasional (CTN). Karena kecewa, pada bulan Januari 1952 menyatakan melawan pemerintah dan merupakan bagian dari NII Kartosuwiryo, dan akhirnya dapat ditumpas pada bulan Februari 1965.

4) Di Aceh, DI/TII dipimpin Daud Beureuh (Mantan Gubernur Militer Daerah Aceh tahun 1947), karena berpikir separatis maka pada 20 Desember 1953 mengeluarkan "Maklumat" bahwa Aceh merupakan bagian "Negara Islam Indonesia" dibawah pimpinan

Imam Kartosuwiryo. Daud Beureuh dapat menguasai sebagian besar daerah Aceh terutama daerah Pidie, namun akhirnya dapat ditumpas oleh pemerintah dengan operasi militer yang diberi nama Operasi Pancasila (Opspas), sehingga DI/TII dapat didesak dari kota-kota dan lari bergerilya di hutan. Pada Desember 1962 pemberontakan DI/TII Aceh dapat diselesaikan dengan baik, oleh Pangdam-I/skandar Muda, Kolonel M. Jasin dengan memprakarsai "*Musyawahar Kerukunan Rakyat Aceh*", dimana pada waktu itu sistem komando dan pengendalian pemberontakan DI/TII di Aceh nampak solid dengan tokoh-tokohnya yang diakui dan mempunyai legitimasi mutlak seperti Teungku Daud Beureuh Cs dan melalui ikrar Lanteh tersebut permasalahan DI/TII Aceh dianggap selesai, tetapi setelah munculnya Hasan Tiro yang kemudian datang ke Aceh setelah belajar dari Amerika berupaya memproklamasikan Gerakan Aceh Merdeka pada 14 Desember 1976 di wilayah Kab. Pidie dengan keinginan sepenuhnya kemerdekaan bangsa Aceh dengan bermodalkan 6 pucuk senjata ide separatisme tersebut terus berkembang secara laten dan mampu mengirimkan ratusan pemuda Aceh untuk berlatih kemiliteran di Camp. Tajura Libia yang kemudian bergerak di bawah tanah mengembangkan front klandestine, front politik, yang pada 1989 GAM merebut senjata TNI yang sedang melaksanakan AMD, kemudian TNI melaksanakan pengejaran dan terungkap pula bahwa kekuatan

front politik di luar negeri dan front klandestine di dalam negeri mampu melakukan lalulintas personel GAM berikut pengiriman senjata secara sangat tertutup. Pada 1998 kekuatan GAM telah hancur dan sebagian besar melarikan diri ke luar negeri tetapi dengan kebijaksanaan penarikan seluruh pasukan non organik dari wilayah Aceh sementara para tahanan eks GPK dan GAM yang di luar negeri masuk kembali ke Aceh didukung dengan front penggalangan massa untuk memaksa masyarakat berkumpul ataupun memaksa masyarakat menjadi pengungsi maka perimbangan kekuatan separatisme menjadi terbalik apalagi justru GAM dibantu untuk menginternasionalkan dirinya dan duduk sejajar dengan pemerintah Republik Indonesia. Kiranya GAM dengan segala frontnya mampu dengan cerdas memanfaatkan era global dan mengedepankan masalah HAM, hukum, dan demokratisasi. Apakah invincible government GAM yang cukup solid mengikuti struktur organisasi pemerintahan sipil dan pemerintahan militer pada akhirnya menjadi government GAM yang diakui dan berdaulat, kiranya pengalaman menyikapi Timor Timur dimana trend perjuangannya analog dengan GAM nampak perlu disikapi dengan arif namun tegas.

- 5) Pada akhir abad 20 faham dan gerakan DI/TII NII ini di Jawa Tengah dan Jawa Barat cenderung aktif kembali walaupun

- 2) Tindakan RIS sudah bertentangan dengan KMB dan UUD-nya.
- 3) Sikap ketidakrelaan Belanda meninggalkan Republik Indonesia, maka Belanda berusaha meninggalkan "Bom Waktu" yaitu membentuk negara boneka dari bekas KNIL suku Maluku yang setia. Pemberontakan RMS dapat dihancurkan pada Desember 1963 oleh APRI pimpinan Kolonel Alex Kawilarang, namun APRI kehilangan 3 (tiga) orang pahlawan, yaitu Letkol Ign. Slamet Riyadi, Letkol S. Sudarto dan Mayor Abdullah. Setelah pemberontakan RMS selesai, maka diangkat J. Latuharhary sebagai Guernur Maluku dan selanjutnya banyak orang Maluku yang menjabat dalam struktur dalam pemerintahan.

Walaupun gerakan RMS secara fisik sudah hancur akan tetapi secara terselubung masih ada walaupun kecil yaitu masih ada kelompok-kelompok kecil seperti yang berada di negara Belanda. Dan di Maluku sendiri setiap tahun mereka mencoba menampakan eksistensinya secara terbatas dengan mengibarkan bendera dan penyebaran pamflet.

d. Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Masalah Irian Barat (sekarang Irian Jaya) bermula dari pihak Belanda yang mengingkari salah satu KMB yaitu tidak bersedia membicarakan penyelesaian kekuasaan atas Irian Barat kepada RI pada tahun 1950. Republik Indonesia bertekad membebaskan Irian Barat baik

secara yuridis, diplomatis maupun fisik dengan membentuk "TRIKORA" yang isinya sebagai berikut :

- 1) Gagalkan pembentukn negara boneka Papua buatan Kolonial Belanda.
- 2) Kibarkan Sang Merah Putih di Iran Barat tanah air Indonesia.
- 3) Bersiaplah untuk mobilisasi umum mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa.

Akhirnya pada 1 Januari 1963 Irian Barat dapat dibebaskan dan kembali kepangkuan Ibu Pertiwi, dan secara resmi diserahkan oleh UNTEA (PBB) pada 1 Mei 1963 ke Republik Indonesia. Kemudian pada tanggal 5 Juli 1969 diadakan penentuan nasib sendiri bagi rakyat Irian Barat dengan dilaksanakan pernyataan pendapat rakyat (Pepera) diawasi PBB. Namun Belanda meninggalkan "Bom Waktu" yaitu mereka telah membentuk OPM dengan latar belakang sebagai berikut :

- 1) Belanda masih ingin eksis di Irian Barat pada satu saat, maka perlu membuat negara boneka.
- 2) Untuk mengelabui dunia internasional bahwa seakan-akan rakyat Irian Barat ingin merdeka mandiri lepas dari negara manapun termasuk dari Republik Indonesia.
- 3) Memperkuat pasukan Belanda yang akan menghadapi serbuan APRI.

Pada saat ini OPM ternyata masih ada walaupun berubah bentuk menjadi GPK (Gerakan Pengacau Keamanan) yang ingin membentuk negara sendiri. Saat ini gerakan mereka berkembang dengan mengembangkan empat front perjuangan yaitu front politik, front klandestine, front massa dan front bersenjata.

Kegiatan GPK ini dipengaruhi perkembangan dunia antara lain :

- 1) Gerakan ras Melanisia seperti "Melanisia Spearhood Group" dengan issue suku Papua menyatakan bagian dari ras Melanisia.
- 2) Kesenjangan kehidupan soial akibat dari dampak negatif pembangunan.
- 3) Pihak asing tertentu yang kurang menyenangi kalau Republik Indonesia menjadi negara yang maju.

Dari uraian kondisi separatisme maupun gerakan separatis yang ada saat ini, sebenarnya yang tergolong sebagai separatisme adalah GAM (GPK Aceh) dan OPM (GPK Irja).

Tantangan terbesar bagi proses integrasi nasional di Indonesia adalah kemajemukan rakyat Indonesia yang mencakup geografi yang sangat luas dan sarwa Nusantara. Tindaklah mudah menyatukan berbagai golongan rakyat yang berbeda latar belakang budaya, agama, serta tingkat pendidikannya. Terlebih lagi pada kondisi geografis yang tersebar luas di seluruh wilayah nusantara ini, serta pada kondisi kesejahteraan sosial masyarakat yang masih lemah dan mengandung berbagai kesenjangan. Pada hakekatnya gerakan

separatis timbul sebagai reaksi ketidak puasan terhadap kondisi kesenjangan yang cukup tajam. Oleh karena itu tidaklah keliru bila dikatakan bahwa kondisi kesenjangan sosial budaya, kesenjangan sosial ekonomi dan kesenjangan komunikasi merupakan faktor-faktor potensial yang dapat menyebabkan munculnya gerakan separatis, walaupun faktor mendasar adalah adanya niat dan pemikiran untuk merdeka yang berangkat dari analisis sejarah yang menyimpang.

Pada faktor kesenjangan sosial budaya sebagai akibat kemajemukan latar belakang budaya itu maka pengakuan atas identitas etnik menjadi faktor yang menonjol. Semua kelompok etnik pada umumnya ingin agar harkat martabat etniknya dihargai dan diakui eksistensinya. Oleh karena itu pengingkaran, penolakan, pelecehan bahkan meniadakan keberadaan identitas budaya etnik akan menjadi faktor laten pemicu munculnya gerakan separatis dari kelompok etnik bersangkutan. Kelompok etnik daerah ingin diakui perannya sejajar dengan kelompok etnik lainnya dan mendapatkan perlakuan yang berimbang dan adil dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta dalam semua aspek kehidupan baik pada aspek sosial politik, sosial ekonomi, sosial masyarakat maupun aspek pertahanan keamanan.

Perlakuan yang kurang berimbang dalam aspek sosial politik misalnya dapat berupa tekanan-tekanan politik, ketidakadilan dalam penerapan hukum, dominasi berlebihan pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan perimbangan yang berat ke pusat dalam penentuan pimpinan jabatan birokrasi. Dari aspek ini muncul aspirasi menampilkan "Putra Daerah" dan

menolak tokoh "droping" dari pusat. Dalam aspek kehidupan sosial ekonomi, perlakuan yang kurang dan belum berimbangnya alokasi dan distribusi program-program pembanguann dan hasil-hasil pembangunan. Daerah yang cukup potensial memiliki sumber kekayaan alam pada dasarnya berhak mendapatkan alokasi program pembangunan dan distribusi hasil pembanguann yang adil dan berkesinambungan. Dalam kehidupan aspek sosial budaya, ketidak pedulian etnik antara lain dapat dilihat dari kurangnya pemberian kesempatan mengikuti pendidikan bagi putra-putri daerah, perlakuan kesejahteraan sosial yang berat ke pusat atau kedaerah lain, serta perlakuan yang kurang berimbang dalam kehidupan beragama. Sedang dari aspek Hankam, perlakuan yang kurang berimbang yang menyangkut identitas etnik antara lain dapat dilihat dari kurangnya kesempatan putra-putri daerah bersangkutan menjadi prajurit TNI dalam rangka pembelaan negara serta minimalnya prajurit dari daerah atau etnik tertentu diangkat dalam jabatan strategis, faktor rekrutment persoalannya adalah module test dari Sabang – Merauke disentralisir di Bandung (Jawa) yang faktanya sulit ditembus putra daerah.

Faktor kesenjangan sosial ekonomi sebagai penyebab timbulnya gerakan separatis dapat diartikan sebagai perimbangan kondisi sosial ekonomi yang sangat lemah pada pihak etnik daerah yang bersangkutan. Dalam hal ini dapat kita bedakan kesenjangan kondisi sosial ekonomi secara struktural ataupun secara sosial. Kesenjangan struktural dapat menimbulkan kecemburuan sosial bagi strata sosial ekonomi pada tingkat bawah dan lemah yang biasanya ada di daerah. Apabila masalah ini tidak dapat diatasi secara tepat akan menimbulkan

gejolak sosial secara nasional akan membahayakan eksistensi bangsa dan stabilitas nasional, kesenjangan atau kesenjangan antar daerah terutama disebabkan oleh kondisi dan konstelasi geografi kepulauan Nusantara yang sangat luas. Apabila pembangunan nasional tidak merata keseluruh wilayah dan hasil-hasil pembangunan tidak dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat diberbagai wilayah Nusantara, maka kondisi ini akan memicu aspirasi separatis kedaerahan yang membahayakan integrasi nasional.

Dalam masalah primordialisme sempit, apa yang kita kenal dengan istilah SARA yaitu eksklusifitas suku, agama, ras dan antar golongan, adalah bertentangan dengan semangat dan tekad Bhineka Tunggal Ika apabila kita tidak memperkokoh Wawasan Nusantara sebagai wawasan kebangsaan kita yang mengamankan persatuan dan kesatuan pada setiap aspek kehidupan, maka sikap eksklusifitas tadi dapat membahayakan persatuan bangsa dan integritas nasional, apalagi jika ditunjang dengan pola penyebaran penduduk yang ditempatkan pada wilayah-wilayah sebagai etnis pendatang secara fisik terpisah dengan penduduk asli, sehingga pola pembauran sama sekali terabaikan maka konflik antar etnis menjadi masalah waktu.

Pada kesenjangan komunikasi, yang dimaksud adalah kesenjangan transportasi dan komunikasi antara pusat dan daerah, antara satu daerah dengan daerah lain, serta antar unsur-unsur dalam daerah. Integrasi nasional dalam berbagai aspeknya mustahil dapat terwujud tanpa dukungan sarana transportasi dan komunikasi antara berbagai golongan yang mendiami berbagai daerah. Oleh karena itu tersedianya jaringan transportasi darat, prasarana

perhubungan laut dan udara, media massa, komunikasi satelit serta transmisi listrik yang mendukungnya adalah mutlak tersedia. Perasaan keterasingan dalam kehidupan nasional serta dorongan untuk memberontak mudah timbul pada masyarakat di daerah yang terpencil dan kurang terjangkau komunikasi.

Belajar dari pengalaman dan adanya kesenjangan-kesenjangan tersebut di atas, pada masa Orde Baru, ideologi Pancasila sungguh ingin dibumikan untuk menapasi seluruh sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Implementasi ditetapkannya Pancasila sebagai satu-satunya azas dalam kehidupan organisasi kemasyarakatan dan politik. Idennya jelas dan sederhana jangan sampai bangsa ini terpecah belah karena faktor ideologi. Namun kemudian, seiring dengan tuntutan reformasi yang sangat cepat, persoalan azas dan penunggalan mendapatkan titik perubahannya.

Era reformasi ini menyadarkan kita, bahwa disatu sisi Pancasila telah menyelamatkan bangsa Indonesia dari ancaman disintegrasi selama lebih dari tiga dasawarsa, tetapi sakralisasi dan penggunaan berlebihan dari ideologi negara dalam format politik Orde Baru juga membuahkan kritik dan protes terhadap "Sang Pemersatu" itu. Munculnya pemikiran yang berkembang di masyarakat tentang tidak perlunya Pancasila dicantumkan sebagai azas politik, meskipun tetap dipertahankan sebagai ideologi negara, barangkali dari kondisi masalah itu.

11. Fenomena Kebebasan.

Kata "Kebebasan" dalam era globalisasi dewasa ini merupakan kata sakral yang digunakan dalam fora internasional dan bahkan dalam hubungan

kawasan Pasifik ini berdampak ganda terutama dengan persaingan tajam yang dikonstatir sebagai watak dari globalisasi tersebut. Persaingan tajam tidak hanya dalam bentuk dominasi modal perebutan pangsa pasar komoditas, jasa akan tetapi dalam segala aspek kehidupan. Persaingan tajam juga tidak hanya ditujukan terhadap bangsa lain akan tetapi pada bangsa sendiri. Persaingan tajam antar kelompok utamanya elit politik dan menjurus ke SARA seperti fenomena akhir-akhir ini. Persaingan tajam melahirkan suatu bentuk guncangan kelompok dengan menghalalkan segala cara. Kepentingan kelompok, primordialisme menjadi tujuan dan mengorbankan kepentingan bersama, persatuan dan kesatuan bangsa.

Sementara negara-negara maju mengeruk keuntungan dari disorientasi nilai. Kondisi obyektif dunia dewasa ini pada gilirannya sering dijadikan landasan bagi upaya untuk memperoleh dukungan internasional bagi gerakan separatisme atau gerakan bawah tanah tertentu. Tuntutan kemerdekaan dan otonomi menjadi destruktif dan bahkan saling menghabisi.

Faktor lain yang ikut memperkeruh insekuritas (ketidakamanan) tersebut adalah bubarnya Uni Soviet dan kehancuran sistemik negara-negara Eropa Timur di penghujung dasawarsa 80-an. Fenomena keruntuhan ini sering menjadi aspirasi perjuangan politik dan sekaligus merupakan acuan bagi gerakan bawah tanah yang berorientasi pada pembentukan suatu tatanan dunia baru. Sempalan-sempalan gerakan radikal atau revolusioner baru bermunculan.

Demokratisitas, hak-hak azasi, konservasi alam peduli lingkungan merupakan landas baik bagi perjuangan kebebasan .masing-masing

pemerintahan merancang suatu strategi untuk mempertahankan eksistensi dan kelangsungan hidup. Dengan demikian tidak terpuruk dalam arus kepentingan global. Suatu kebijakan politik harus dirumuskan agar tidak terjebak dalam advonturisme politik tersebut maka mutlak melakukan tindakan antisipatoris dan proteksif. Tindakan ini dimaksud agar terhindar dari arus globalisasi yang cenderung menghapuskan nilai-nilai nativistik yang mutlak harus dipertahankan sebagai suatu jaminan bagi jati diri suatu bangsa. Demikian juga bahwa curah liberalisasi yang dikemas sedemikian rupa sehingga dapat dijadikan sebagai senjata ampuh untuk mengadakan pemberontakan terhadap pemerintah yang berkuasa.

Dengan demikian suatu pemikiran refleksif mengenai kemanusiaan menjadi suatu tuntutan yang mendesak. Dalam konteks ini, pemerintah dituntut untuk berupaya sekuat tenaga untuk mengadakan berbagai terobosan, langkah inovatif dan tindakan konstruktif untuk menipis curah nilai dan budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya suatu bangsa.

Hal yang paling mendasar yang menjadi perenungan barangkali ikut melahirkan munculnya keberingasan massal akhir-akhir ini, lahir sebagai akibat logis dari persaingan tajam dalam era globalisasi, kalau demikian halnya, maka diperlukan keberanian untuk menciptakan suatu persepsi bahwa globalisasi tidak semestinya ditafsirkan sebagai yang bermuatan persaingan tajam. Persaingan tajam adalah makna denotative dari warisan perang dingin. Sementara dewasa ini hubungan antar bangsa harus diletakkan dalam konteks prinsip "kemitraan". Substitusi persaingan tajam dengan kemitraan yang berorientasi pada

kepentingan bersama atas prinsip saling menguntungkan pada gilirannya akan melahirkan suatu kualitas nilai kemanusiaan baru. Kemitraan mengandung makna yaitu memupuk rasa kebersamaan, persatuan dan kesatuan yang semakin kohensif antar bangsa yang menuntut suatu pengakuan hak-hak perorangan, nativistik dan bangsa, kedaulatan agama dan jadi diri suatu bangsa akan lebih terjamin dan saling memperkaya. Penciptaan suatu tatanan dunia baru bukan lewat persaingan akan tetapi melalui kemitraan menuju unitas melalui diversitas. Dengan kemitraan ketakutan, kecurigaan, eksklusifisme dan primordialisme akan hilang. Persaingan yang timbul berubah menjadi suatu variasi persaingan sehat dan saling menguntungkan. Kemitraan di dalam dirinya sarat dengan persaingan sehat dan simbiostik sifatnya.

Dalam kemitraan menuntut perjuangan ketat akan perlunya percaya akan kekuatan diri sendiri dalam upaya aktualisasi diri. Prinsip kemitraan dalam era globalisasi merupakan modal dasar bagi pengaruh eksternal. Diaspora yang bermotif anarki dan syarat dengan muatan ego bangsa apabila berpegang pada prinsip kemitraan pada akhirnya bukan merupakan sinerjis bagi negara-negara berkembang apabila berpatokan pada prinsip kemitraan ini akan mengambil bentuk yang positif dalam setiap insan mondial sehingga hubungan antara personal, antar bangsa tidak lagi dibayangi ras curiga atau bara kebencian.

Globalisasi abad 21 mendatang merupakan suatu tantangan dan menuntut dilaksanakannya kebebasan. Penanganan yang arif dan pelaksanaan pemerintahan kemauan politik yang bertolak dari kebebasan niscaya akan menghindarkan kita dari disuenitas dan disintegratif. Kebebasan yang sering

menjadi issue politik baik di tataran internasional maupun dalam negeri mutlak mendapat perhatian yang serius. Kebebasan yang bermakna denotative dan bermuatan heuristik serta berdimensi luas, dan bersifat mondial pada akhirnya harus kita fahamkan dalam konteks nilai budaya, akar sejarah dan aspirasi bangsa. Pemahaman ini pada gilirannya harus diartikulasikan secara kontekstual sesuai dengan jati diri bangsa kita.

Filsafat mengembalikan pada porsi yang mendasar. Soal penampilan adalah suatu tantangan. Kita hanya suatu instrumen. Filsafat hanya merupakan instrumen dari berbagai instrumen yang ada dalam konteks ideologi, politik, sosial-budaya dan Hankam. Kebebasan sebagai nilai dasar yang harus di implementasikan. Kebutuhan pemikiran kontemplatif perenungan falsafati terhadap fenomena global paradoks dan berbagai tragedi nasional akhir-akhir ini yang mengancam kesatuan dan persatuan merupakan hal yang mendesak dan perlu langkah-langkah yang kongkret.

12. Fenomena Aktual dengan Faham Otonomi Daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah telah dimulai secara definitive pada awal Januari 2001. Pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi dan politik saat itu. Pada prinsipnya otonomi daerah dimaksudkan untuk memberikan kewenangan dan keleluasaan yang lebih luas kepada daerah di dalam mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan daerah termasuk kewenangan dalam pengelolaan sumber daya alam di wilayahnya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kondisi geografis yang terdiri dari beribu pulau, tanah-tanah datar dan gunung-gunung serta laut yang mengelilingi pulau-pulau, mengakibatkan tingkat kesuburan dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya atau tidak merata, selain itu jumlah penduduk dan kualitas intelektualnya juga berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Kondisi geografis dan demografi tersebut dapat menimbulkan dampak negatif dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Adapun dampak negatif pelaksanaan otonomi daerah terdapat beberapa fenomena sosial, antara lain dapat berupa :

a. Timbulnya Konflik

Konflik dapat terjadi :

- 1) Secara internal yaitu antara pemerintah daerah dengan pemerintah desa. Pemerintah desa dalam UU No. 22/1999 mempunyai kewenangan-kewenangan, yang kemungkinan dapat berbenturan dengan kewenangan daerah.
- 2) Secara eksternal yang bersifat horizontal. Konflik dapat Secara eksternal bersifat vertikal, yaitu konflik antar kabupaten dengan propinsi atau daerah dengan pusat. Konflik/benturan antar daerah dengan propinsi dapat terjadi karena antar daerah otonomi dengan propinsi otonomi tidak ada hubungan hierarchi (pasal 4). Konflik/benturan antar daerah dengan kabupaten/kota, antar kabupaten/kota dengan propinsi dan antar pemerintah pusat dapat

terjadi dalam hal-hal yang belum diatur dengan jelas dan rinci. Misalnya : pembagian pendapatan asli daerah di luar sumber daya alam.

3) Secara eksternal yang bersifat horizontal. Konflik dapat terjadi dalam perebutan pengelolaan sumber daya alam yang berada di antara dua daerah, dengan budaya dan daerah yang berlebihan.

b. Disintegrasi

Disintegrasi bisa timbul karena adanya daerah-daerah yang potensi sumber daya/kekayaan alamnya berlimpah/berlebih, sehingga daerah-daerah tersebut mampu menyelenggarakan pemerintahan dengan tingkat kesejahteraan masyarakatnya yang tinggi. Hal ini dimungkinkan karena hasil sumber daya alam dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) nya melebihi kebutuhan biaya penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kondisi seperti ini akan menumbuhkan kerajaan-kerajaan/atau raja-raja kecil yang berpotensi untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Disintegrasi ini mungkin juga terjadi karena daerah cenderung eksklusif, mementingkan daerahnya sendiri tanpa memperhatikan kepentingan daerah lain, termasuk kepentingan pemerintah pusat. Penolakan terhadap calon kepala daerah dari luar (hanya mau putra daerah), dan penolakan pengalihan pegawai pusat ke daerah merupakan

menghasilkan pendapatan daerah melalui penetapan berbagai macam pajak dan retribusi tersebut akan menimbulkan masalah yang lebih besar/luas yaitu ekonomi biaya tinggi (*high cost economy*). Belum lagi masih banyaknya pajak-pajak/pungutan-pungutan yang tidak resmi yang selama ini sudah membudaya di kalangan masyarakat. Ekonomi biaya akan mendorong harga-harga naik dan pada akhirnya berpengaruh pada tingkat inflasi baik inflasi daerah maupun inflasi nasional. Hal ini dapat menimbulkan gejolak sosial.

e. Masalah KKN.

Sebagaimana diatur dalam UU No. 22 tahun 1999 dan UU No. 25 tahun 1999, sumber pendapatan daerah di samping berupa PAD, juga berasal dari dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Dana perimbangan dari Dana Alokasi Umum (DAU) akan di drop dari pusat secara berkala. Dalam APBN tahun 2001 ditetapkan DAU untuk seluruh daerah minimal 25% dari penerimaan dalam negeri dengan 90% untuk kabupaten dan kota dan 10% untuk Propinsi. Pemanfaatan DAU sepenuhnya diserahkan kepada daerah. Sementara itu pertanggungjawaban keuangan daerah hanya disampaikan kepada DPRD. Kewenangan dan pertanggungjawaban tersebut membuka peluang terjadinya KKN. Dengan kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di satu pihak bisa mengurangi terjadinya KKN di

tingkat pusat, tetapi akan menimbulkan atau mengalihkan permasalahan KKN ke daerah.

13. Fenomena Aktual dengan Faham Politik Praktis dengan Memanfaatkan Issue SARA.

a. Pembubaran BP-7.

Pencabutan Tap MPR Nomor : II/MPR/1978 serta pembubaran BP-7, secara tidak langsung telah melemahkan Pancasila sebagai dasar negara, karena sampai saat ini belum ada cara yang mengena di dalam menggantikan tugas BP-7 untuk membumikan Pancasila sebagai dasar negara. Kebebasan mempelajari faham marxisme/Komunisme pada era Presiden Abdurrachman Wahid saat ini serta pemikirannya yang ingin mencabut Ketetapan MPR Nomor : XXV/MPRS/1966 yang memberikan angin segar bagi pengikut PKI yang masih ada, seharusnya diimbangi pemerintah untuk lebih memasyarakatkan Pancasila, agar nilai-nilai luhur budaya bangsa tersebut yang telah menjadi pandangan hidup, dasar negara dan ideologi negara tidak tererosi dari jiwa bangsa Indonesia. Berbagai peristiwa yang berlangsung akhir-akhir ini, mirip dengan apa yang pernah terjadi menjelang pemberontakan G.30.S/PKI. Kemungkinan perubahan strategi (bahaya laten PKI) dari fisik ke non fisik, tidak kita sadari pada saat ini terus berlangsung yaitu dari strategi membunuh ke strategi memfitnah.

Kondisi politik yang terus diwarnai kekerasan, seperti kasus SARA, penyelenggaraan hukum dan HAM secara tidak sadari telah mendorong

bangsa Indonesia ke jurang perpecahan yang lebih dalam. Dan apabila hal ini dibiarkan maka membuat masyarakat frustrasi dalam kondisi seperti itu akan lebih memudahkan jaringan peredaran NARKOBA internasional untuk memasarkan produk-produk berbahaya yang dapat menghancurkan satu generasi bangsa ini.

Kasus Ambon, Aceh dan Irija serta daerah-daerah lain yang mempunyai kecenderungan serupa sudah menunjukkan bahwa usaha-usaha disintegrasi telah terjadi dan terus berlangsung. Untuk ini pemerintah harus mengambil langkah yang tepat mengatasinya bila tidak ingin berulangnya peristiwa terpisahnya Timor Timur akibat turut campurnya negara-negara barat yang berkepentingan di kawasan ini dengan mengatasnamakan PBB.

Pemerintah harus segera menunjukkan tingkat stabilitas keamanan yang dapat memberikan jaminan bagi pengembangan dunia usaha serta penanaman modal asing, karena dengan jaminan itulah investasi, lapangan kerja akan muncul dan dapat mengurangi pengangguran karena terjadinya PHK di masa krisis telah meningkatkan angka kriminalitas.

- 1) Melemahnya dukungan komunisme internasional terhadap gerakan-gerakan komunis di Indonesia tidak harus mengendurkan kewaspadaan pemerintah terhadap bahaya laten komunis, mengingat sejarah telah membuktikan bahwa PKI telah beberapa kali berkhianat pada pemerintahan yang syah dan pola gerakannya telah dapat terdeteksi oleh aparat.

- 2) Kemampuan teknologi komunikasi dan informasi di satu sisi memang memberikan nilai tambah bila dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, akan tetapi pemanfaatannya juga dapat digunakan untuk hal-hal negatif oleh pihak-pihak yang berkepentingan di dalam maupun dari luar negeri sehingga upaya pemerintah menangkal eksese-eksese negatif tersebut perlu dilakukan terus-menerus dan berkelanjutan.
- 3) Di dalam pemulihan perekonomiannya Indonesia memang perlu memanfaatkan dukungan badan dunia untuk pemulihan ekonominya, akan tetapi juga harus mempertimbangkan kepentingan bangsa, agar tidak merugikan rakyat banyak, karena terpaksa harus menampung beban terlalu besar akibat kesalahan pemerintahannya.
- 4) Perkembangan politik yang terjadi di Korea, akan dapat dimanfaatkan pemerintah Indonesia untuk mengadakan kampanye pencegahan disintegrasi bangsa dan negara dan menangkal kampanye serupa oleh pihak-pihak yang menghendaki disintegrasi. Yang penting disini adalah bagaimana Indonesia dapat meyakinkan dunia internasional bahwa pemerintah mampu menuntaskan permasalahan dalam negerinya tanpa harus mengundang kekuatan yang mengatasnamakan PBB untuk mencampuri urusan dalam negeri Indonesia. Dan yang paling penting adalah bagaimana rasa kebangsaan dan kecintaan pada tanah air ini dibangkitkan kembali, bagaimana jiwa Pancasila yang telah tertanam di

sebagian besar jiwa masyarakat Indonesia digugah kembali. Dalam kehidupan politik sangat terasa adanya pengaruh dari statemen politik para elit maupun pimpinan nasional, yang sering kali mempengaruhi sendi-sendi kehidupan bangsa, sebagai akibat masih kentalnya bentuk-bentuk primordialisme sempit dari kelompok, golongan, kedaerahan bahkan agama. Hal ini menunjukkan bahwa para elit politik secara sadar maupun tidak sadar telah memprovokasi masyarakat. Keterbatasan tingkat intelektual sebagian besar masyarakat Indonesia sangat mudah terpengaruh oleh ucapan-ucapan para elitnya sehingga dapat dengan mudah terpicu untuk bertindak yang menjurus kearah terjadinya kerusuhan maupun konflik antar kelompok atau golongan, masih segar dalam ingatan kita tentang beberapa kerusuhan yang diciptakan, seperti Pekalongan, Pantura, pembunuhan Ulama di Jawa Timur, pembunuhan dukun santet yang tidak bisa terungkap hingga sekarang, termasuk di dalamnya kasus ninja dan pertikaian Ambon, Poso, Kalbar dan Sampit serta kerusuhan lainnya yang nampaknya memang ada "The man behind the screen" dalam menciptakan kerusuhan di Indonesia.

b. Faktor-faktor Disintegrasi Bangsa.

Berdasarkan hasil analisis kehidupan berbangsa dan bernegara dalam sejarah kehidupan bangsa serta pengaruh perkembangan lingkungan strategis, maka dapat dicermati semua hal yang menjadi faktor-faktor disintegrasi bangsa, untuk kemudian dapat ditindak lanjuti ataupun diantisipasi agar tidak lebih mempengaruhi sendi-sendi

kehidupan bangsa yang sedang goyah saat ini. Faktor-faktor disintegrasi yang dapat dicermati tersebut antara lain :

1) Primordialisme yang sempit

Bangsa Indonesia yang terdiri dari bermacam-macam suku bangsa, adat-istiadat dan budaya yang sangat beragam, apabila tidak dibina dengan baik akan dapat memunculkan bentuk-bentuk primordialisme yang sempit baik kesukuan ataupun kedaerahan. Pada saat pelaksanaan otonomi daerah apabila tidak diwaspadai hal-hal seperti di atas maka akan dapat mendorong terjadinya benturan antar suku asli daerah dengan suku pendatang akibat adanya rasa kesukuan yang berlebihan yang berdampak kepada ketidaksukaan kepada suku lainnya, baik karena kecemburuan sosial ataupun tidak dapat menerima sikap dan perilaku suku lainnya yang dianggap tidak sesuai ataupun tidak pantas bagi adat dan budaya setempat.

2) Fanatisme Agama yang berlebihan.

Fanatisme agama pada dasarnya adalah sesuatu yang wajar bila dikaitkan dengan keimanan dan ketaqwaan. Akan tetapi bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai agama-acapkali sangat mudah tersulut oleh permasalahan SARA dengan latar belakang agama. Agama Islam yang memiliki penganut sebagian besar penduduk di Indonesia tentu menjadi kunci dalam kerukunan kehidupan umat beragama dan antar agama. Sebab toleransi dan

tenggang rasa dari umat Islam akan dapat memberikan kesejukan dalam hubungan antara agama dan sebaliknya sikap fanatisme yang sempit akan dapat menghancurkan kerukunan kehidupan umat beragama dan antar agama. Demikian pula sebaliknya bagi pemeluk/umat beragama lainnya apabila bersikap eksklusif akan dapat menimbulkan kesenjangan dan rasa antipati dari masyarakat Islam dan sebagian besar masih berada dalam taraf kehidupan yang sederhana bahkan masih ada yang serba kekurangan. Hal lain yang perlu dipertimbangkan di negara ini adalah daerah-daerah yang secara khusus memiliki pemeluk agama yang mayoritas dan daerah-daerah dengan penduduk (suku bangsa) yang jumlahnya minoritas tetapi sebagai penganut agama yang mayoritas di wilayah tersebut seperti Aceh, Kalimantan Selatan, Irian Jaya, Maluku, Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Utara, perlu mendapat perhatian secara khusus termasuk di dalam kebijaksanaan otonomi daerah untuk menghindarkan gejolak yang muncul dengan latar belakang permasalahan agama dan fanatisme yang berlebihan.

3) Euforia Otonomi Daerah

Otonomi daerah bertujuan agar perkembangan daerah dapat lebih mendorong dan lebih memberdayakan pemerintah daerah untuk mengadakan pemerintahan dan pembangunan daerah. Dewasa ini memang telah muncul wacana untuk

mendirikan negara-negara terpisah dari NKRI yang diakibatkan kebijaksanaan pemerintah yang lalu lebih mementingkan pemerintahan pusat, belum lagi adanya saling ketergantungan daerah baik dari sarana/prasarana sumber energi yang kemudian memunculkan berbagai macam pungutan pajak, ditambah dengan pengertian yang keliru terhadap maksud otonomi daerah, di mana sempat terjadi seorang Bupati tidak mau menghadap kepada Gubernur Kepala Daerah karena merasa tidak diangkat/di bawah Gubernur. Hal semacam itu tentunya perlu ditata kembali dan perlunya pemasyarakatan secara tuntas tentang bagaimana seharusnya otonomi daerah diimplementasikan.

4) Euphoria Politik

Implementasi demokrasi dewasa ini di kalangan elit politik sering dikaitkan dengan kepentingan kelompok dikedepankan/didahulukan di atas kepentingan bangsa dan negara, bahkan sering diwarnai dengan primordialisme yang sempit ataupun fanatisme agama yang berlebihan. Bahkan di kalangan masyarakat telah menjurus kepada tidak mengakui keberadaan hukum serta pelanggaran hak asasi manusia. Demokrasi atau reformasi lebih dipahami sebagai bentuk kebebasan untuk bertindak apa saja. Kebrutalan dalam aksi-aksi demo juga perlu diwaspadai sebagai bentuk provokasi terhadap aparat yang pada akhirnya dapat menyeret massa untuk

melakukan pengrusakan dan tindakan-tindakan brutal yang bersifat anarkis.

5) Lemahnya Kualitas Sumber Daya Manusia.

Tidak dapat dipungkiri bahwa krisis moneter dan ekonomi yang melanda Indonesia makin menambah jumlah penduduk miskin, putus sekolah maupun kehilangan pekerjaan. Kondisi seperti itu telah menimbulkan kerawanan karena semakin mempersulit masyarakat tersebut untuk mendapatkan biaya hidup yang memadai, sehingga tidak tertutup kemungkinannya mencari jalan pintas yang melanggar hukum, atau dapat dimanfaatkan oleh kepentingan-kepentingan tertentu untuk menanggapi mereka dengan janji-janji imbalan kesejahteraan dan juga perlu diwaspadai pada kondisi tersebut adalah peran gerakan-gerakan komunisme dalam bentuknya yang baru karena rakyat yang lapar, miskin dan terbelakang memang menjadi sasaran aktifitas kelompok ini.

6) Peranan media massa yang tidak profesional dan proporsional.

Media massa seperti media cetak dan elektronik memang merupakan sarana yang sangat efektif di dalam pendewasaan, peningkatan kualitas intelektual masyarakat akan tetapi juga sekaligus dapat digunakan untuk kepentingan-kepentingan kelompok, baik untuk dalam penciptaan opini maupun menunjang kebijaksanaan pemerintah atau untuk memprovokasi masyarakat

sehingga pemberitaan yang tidak proporsional dan sangat subyektif diterima masyarakat seolah-olah menjadi kebenaran atau membenaran terhadap sesuatu yang keliru, sehingga telah menyesatkan pemikiran dan anggapan masyarakat terhadap permasalahan-permasalahan yang sebenarnya terjadi, seperti memojokkan pemerintah, memojokkan aparat hukum, TNI dan Polri bahkan cenderung menjual harkat dan martabat bangsanya. Hal seperti inilah yang merupakan salah satu penyebab penyulut konflik, sehingga masyarakat kehilangan jatid dirinya dan terjadilah saling hancur menghancurkan dan saling bunuh sesama anak bangsa.

7) Peran Negara Asing.

Posisi strategis dari geografis Negara Kesatuan Republik Indonesia serta kemampuan sumber daya alam dan potensi alamnya yang besar tidak dapat dipungkiri telah menyebabkan negara-negara asing sangat berkepentingan terhadap Indonesia. Sejarah telah membuktikan bahwa penjajah Belanda maupun Jepang sangat berkepentingan terhadap kekayaan alam Indonesia. Tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) merupakan bagian dari tujuh jalur transportasi/lalulintas laut di dunia yang dilalui oleh kapal-kapal pelayaran samudera. Karenanya patut diwaspadai segala macam konspirasi internasional dengan segala macam dalih dan isue-isue yang memojokkan Indonesia seperti

demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan lingkungan hHidup, sesuai dengan ucapan mantan Menlu Kisisnger tentang *"The third war is not the nuclear war. but the surbversive war"*, pada situasi terakhir jelas nyata kiprah dunia internasional dalam memanage komplik di Indonesia seperti kasus Timor Timur, kasus Aceh, dan kasus Irja, demikian pula dukungannya terhadap LSM tertentu yang sealiran. Apabila Indonesia tidak secara hati-hati dan bijaksana menyikapinya akan memungkinkan kekuatan-kekuatan asing yang berkepentingan menggoyahkan integrasi nasional untuk mencapai tujuannya menguasai kawasan Nusantara. Hal itu akan mudah dilaksanakan seandainya Indonesia telah terpecah menjadi negara-negara yang lebih kecil seperti pada saat masa berlangsungnya kolonialisme oleh bangsa barat di masa lalu. Hal yang lain yang dapat terjadi yang lebih lunak adalah mendorong Negara Kesatuan Republik Indonesia berubah menjadi negara federal. Kejemukan negara Indonesia sangat rawan untuk terjadinya disintegrasi apabila negara Indonesia berbentuk negara federal. Untuk itu perlu diwaspadai semua gerakan yang mengarah kepada bentuk negara federal, karena pada saat ini bentuk negara federal secara umum sangat rawan apabila diterapkan kepada masyarakat Indonesia yang secara kualitas belum dapat memahami/menghayati kelebihan ataupun kekurangannya.

c) Faktor Astragatra

1) Aspek Geografi.

Kondisi geografis yang terdiri dari beribu-ribu pulau, gunung-gunung, tanah datar dan hutan belantara serta sungainya yang merupakan ciri dari geografis beriklim tropis serta lautnya yang mengelilingi pulau-pulau, mengakibatkan heterogenitas yang sangat tinggi pada tingkat kesuburan tanah dan kekayaan alam yang dikandungnya. Pulau Jawa yang merupakan titik sentral kegiatan membawa dampak kepada keseimbangan bagi pulau-pulau besar di barat, utara, dan di timur. Azas pemerataan, azas keseimbangan yang merupakan implementasi dari faham keutuhan persatuan dan kesatuan ditinjau dari segi geografi selama 32 tahun yang lalu nampaknya perlu ada pembenahan demi mencegah dampak negatif tersebut diatas.

2) Aspek Demografi.

Jumlah penduduk Indonesia sudah mencapai kurang lebih 215 juta orang, dengan penyebaran dan tingkat pendidikan tidak merata, mayoritas kurang pendidikan dan dalam kemiskinan. Oleh karenanya jumlah penduduk yang amat besar sampai dengan sekarang masih merupakan problem sosial. Sumber daya manusia merupakan permasalahan utama dalam otonomi daerah. Program transmigrasi diikuti oleh konflik sosial ekonomi dan budaya yang berakhir dengan konflik SARA di beberapa daerah. Mobilitas

penduduk antar pulau dan antar daerah akan mendukung integrasi bangsa.

3) Aspek Kekayaan Alam.

Kekayaan alam Indonesia cukup melimpah baik di darat maupun di laut dengan sebaran tidak merata antar pulau dan antar daerah. Dampaknya menimbulkan kesenjangan antar daerah yang satu dengan yang lain. Kemudian timbul kecemburuan sosial sebagai awal disintegrasi. Daerah kaya cenderung ingin melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4) Aspek Ideologi.

Otonomi daerah membangun daerah dengan cara, adat dan budaya masing-masing yang berbeda antar daerah yang satu dengan yang lain. Di satu sisi merupakan lingkup dari ideologi Pancasila yang mewadahi keanekaragaman. Namun di sisi lain dapat melupakan ideologi Pancasila itu sendiri. Padahal sebagai ideologi dan dasar negara adalah perekat bangsa yang paling mendasar yang menjembatani dan melingkupi perbedaan-perbedaan tersebut. Dihubungkan dengan kondisi pemahaman bangsa Indonesia tentang Pancasila dan khususnya pengalamannya yang paling tidak konsekuen, menjadi teramat mendasar memantapkan kembali Pancasila sebagai perekat bangsa.

5) Aspek Politik.

Dengan kemandirian lokal dalam otonomi daerah, secara politis merupakan perwujudan pemerintahan yang demokratis, dimana daerah mempunyai kewenangan yang amat luas dalam membangun daerahnya. Dalam skala nasional masih diikat oleh kewenangan pusat dalam bidang-bidang tertentu.

a) Dihubungkan dengan kondisi sikap nasionalisme bangsa Indonesia yang mulai memudar, dalam konteks politik secara nasional, kewenangan politik yang berada di daerah mengandung kerawanan yaitu ketidak loyalan kepada politik nasional. Misalnya politik daerahisasi dalam segala aspek yang menjadi kewenangan daerah baik terbuka maupun terselubung. Oleh karena itu kewenangan pusat untuk mengendalikan hal semacam ini perlu diatur. Di samping itu yang lebih mendasar adalah kesadaran politik seluruh komponen bangsa baik di pusat maupun daerah untuk bersatu dalam otonomi daerah menyongsong Indonesia baru baik karena alasan sejarah maupun karena kepentingan menghadapi tantangan masa depan.

b) Ditinjau dari hubungan antar pusat dan daerah sebaliknya serta antar daerah, diperlukan ikatan-ikatan politik lain di luar supra struktur yang menjamin keterikatan politik secara nasional. Sarana yang tersedia adalah Partai

Politik. Partai Politik menjadi ikatan politik nasional yang paling utama pada kemandirian lokal dalam otonomi daerah.

c) Paradigma pembangunan model apapun tidak akan berhasil manakala pemerintahannya tidak bersih. Atas dasar berbagai pengalaman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia dan sesuai dengan aspirasi masyarakat yang berkembang, pemerintah yang demokratis, bersih, terpercaya merupakan persyaratan pokok keberhasilan kemandirian lokal baik di pusat maupun di daerah.

6) Aspek Ekonomi.

Secara ekonomi mengandung harapan setiap daerah akan maju lebih cepat yang berarti secara nasional pun akan jauh lebih maju serta mempunyai ketahanan ekonomi nasional yang lebih tinggi.

a) Orientasi pembangunan ekonomi oleh daerah tanpa keseimbangan dengan pembangunan sumber daya manusia sama dengan mengulangi kesalahan masa lalu yang mengakibatkan antara lain sekarang ini, khususnya dari aspek moral, dan budaya.

b) Dihadapkan kepada sumber daya alam, buatan dan sumber daya manusia, kedudukan geografis masing-masing

daerah terhadap lingkungannya serta tingkat kondisi ekonomi yang berbeda di setiap daerah dapat dipastikan kemajuan yang satu dengan yang lain akan berbeda. Dalam jangka panjang akan terjadi perbedaan yang amat menyolok, walaupun ada biaya perimbangan dan khusus dari pusat. Kesenjangan antar daerah yang mendalam antar daerah merupakan sumber integrasi bangsa. Maka pusat harus mengambil langkah yang diperlukan. Perbedaan kepentingan dan persaingan ekonomi antar daerah dapat meningkatkan kemajuan daerah, namun berkemungkinan inefisien secara nasional dan bahkan sumber perselisihan antar daerah. Selanjutnya dapat menumbuhkan fanatisme kedaerahan. Perlu dicatat bahwa kasus-kasus SARA selama ini lebih banyak di mulai dari soal mata pencaharian.

c) Dapat dipastikan pula bahwa tidak ada satu daerah pun yang unsur-unsur ekonominya lengkap. Interelasi dan interkoneksi ekonomi antar daerah yang saling melengkapi dan menguntungkan merupakan perekat bangsa. Terlebih-lebih dihadapkan kepada persaingan ekonomi global, interelasi dan interkoneksi ekonomi antar daerah dalam sistem ekonomi nasional merupakan hal yang mutlak perlu.

d) Bagi pemerintah pusat, dengan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, sumber keuangan pemerintah pusat akan berkurang dibanding dengan sebelum otonomi. Padahal pemerintahan pusat memerlukan biaya untuk membayar hutang luar negeri dan untuk dana perimbangan serta untuk membiayai segala sesuatu yang menjadi tanggung jawab pusat. Di samping itu pemerintah pusat memerlukan cadangan devisa untuk membantu daerah yang amat tertinggal dari daerah lain.

7) Aspek Sosial Budaya.

a) Eksistensi keanekaragaman suku, adat dan budaya masing-masing daerah mendapat tempat yang seluas-luasnya dalam otonomi daerah. Di satu sisi merupakan faktor perekat bangsa, namun di sisi lain karena ras senasib sepenanggungan, semangat persatuan dan kesatuan bangsa yang dibangun sejak Sumpah Pemuda 1928 telah luntur akibat kesenjangan sosial dan ketidakadilan, maka kemandirian lokal dapat menimbulkan over eksistensi kesukuan dan kedaerahan. Oleh karena itu penciptaan kondisi senasib sepenanggungan amat diperlukan sebagai faktor perekat bangsa yang utama.

b) Dengan eksistensi keanekaragaman budaya, terbentuk budaya nasional yang akan menjadi identitas bangsa, sumber perekat bangsa.

c) Bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius. Semua agama mengajarkan hubungan yang baik antar manusia. Oleh karena itu agama bukan sumber disintegrasi bangsa sepanjang agama tidak dipolitisir dan sepanjang tidak ada upaya penyebaran agama kepada penduduk lain yang berlainan agama. Apabila agama dipolitisir dan apabila kegiatan penyebaran agama kepada penduduk lain yang berlainan akan timbul perpecahan yang amat dahsyat karena menyangkut keyakinan yang hakiki. Fakta di lapangan menunjukkan di daerah yang penduduknya mayoritas menganut salah satu agama cenderung tidak timbul konflik antar agama apabila yang minoritas dilindungi. Di daerah yang penduduknya menganut dua agama relatif seimbang cenderung terjadi konflik antar umat beragama. Sehubungan dengan itu pemahaman dan implementasi ideologi Pancasila konsekuen menjadi semakin diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Di tinjau dari sudut moral dan etika, moral dan etika agamalah yang paling tepat sebagai landasan moral dan etika bangsa.

d) Kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara pada kemandirian lokal dalam otonomi daerah akan meningkatkan interelasi dan interkoneksi yang luar biasa sebagai akibat meningkatnya partisipasi masyarakat. Dalam berbagai aktivitas tersebut akan diwarnai oleh berbagai benturan yang memerlukan penyelesaian. Di sisi lain kondisi masyarakat belum sadar dan belum taat hukum baik dilihat dari subyek maupun obyeknya. Demikian juga dihubungkan dengan HAM, belum ada keseimbangan antar hak dirinya dan hak orang lain. Oleh karena itu hukum menjadi faktor perekat bangsa yang amat dibutuhkan.

8) Aspek Hankam.

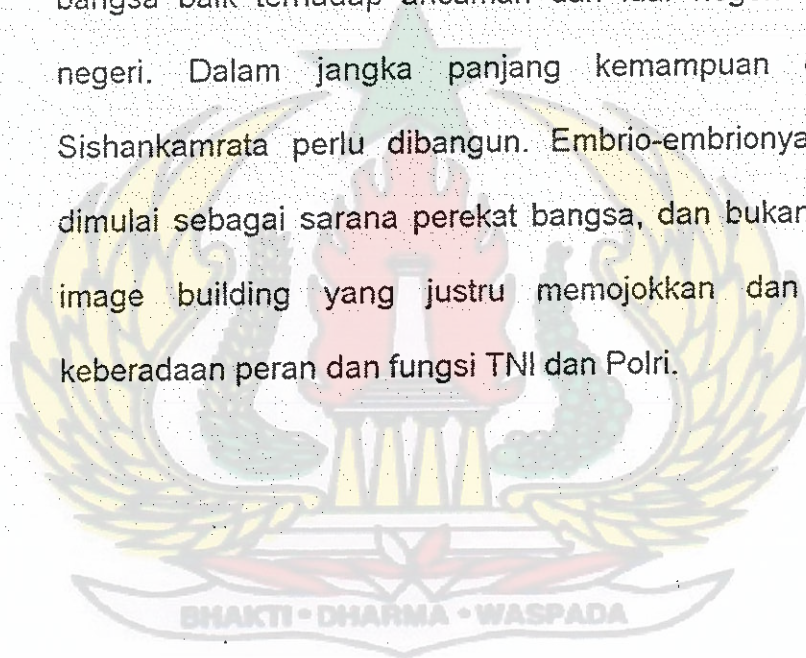
Kondisi gerakan separatisme Aceh dan Irija pada situasi terakhir cukup mengawatirkan karena selain merupakan masalah dalam negeri juga merupakan masalah internasional dengan masuknya era demokrasi dan reformasi serta efek global yang berlaku. Penanganan gerakan separatist tersebut yang biasanya akan selalu berlarut dan melelahkan dalam waktu yang panjang membutuhkan kesinambungan konsepsi penyelesaiannya, sehingga dinamika perubahan situasi tidak menguntungkan pihak separatisme. Pola perjuangan separatisme dengan gaya perang gerilya nampak sangat menyulitkan aparat Polri sebagai ujung tombak penanggungjawab keamanan dalam wilayah. Kiranya

regulasi dan penyesuaian cara mengatasi gerakan separatisme dalam jangka pendek perlu ditempuh.

Pertikaian elit yang diimplementasikan kedalam konflik horizontal dengan kekuatan massa yang besar dengan bernuansa SARA ataupun dalam bentuk skenario penciptaan konflik pembunuhan ataupun memanfaatkan peran media massa nampaknya sulit diredam jika para elit tersebut masih mementingkan kelompok golongan daripada kepentingan bangsa.

Bidang pertahanan pada otonomi daerah adalah kewenangan pusat. Sistem Pertahanan yang dianut adalah Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) yang masih akan relevan bagi bangsa Indonesia di masa depan. Kondisi masih amat bertumpu kepada kekuatan dan kemampuan TNI dan Polri. Dalam jangka pendek kondisi ini masih akan terus berlangsung karena Sishankamrata belum terwujud. Dalam sejarah perjalanan bangsa kekuatan dan kemampuan TNI menjadi perekat bangsa yang utama baik dengan deteren maupun dengan tindakan representatifnya. Kedepan peran TNI sebagai perekat bangsa tetap akan dominan. Kondisi kemampuan dan kekuatan TNI saat ini masih jauh dari standar yang dibutuhkan dihadapkan kepada tugas dan tanggung jawabnya. Dihadapkan kepada reposisi dan redefinisi peran TNI, banyak pihak yang berpendapat tugas pokok TNI hanya dihadapkan kepada ancaman dari luar negeri, sementara itu

ancaman dari dalam negeri dalam bentuk niat pendirian negara dalam negara dengan segala aktivitasnya telah muncul kepermukaan. Dalam hal ini kemampuan dan kekuatan TNI berkedudukan sebagai sarana terakhir perekat bangsa yang dapat digunakan oleh pemerintah. Oleh karena itu kekuatan dan kemampuan TNI dalam wacana otonomi daerah perlu dibangun sehingga mempunyai kemampuan efek deterent dan tindakan nyata dalam rangka mempertahankan eksistensi negara dan bangsa baik terhadap ancaman dari luar negeri maupun dalam negeri. Dalam jangka panjang kemampuan dan kekuatan Sishankamrata perlu dibangun. Embrio-embrionya perlu segera dimulai sebagai sarana perekat bangsa, dan bukannya larut pada image building yang justru memojokkan dan menyudutkan keberadaan peran dan fungsi TNI dan Polri.



BAB IV PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS

14. Umum.

Pada masyarakat global dengan beragam kompleksitasnya seperti jaringan ekonomi, keuangan, produksi, perdagangan, transportasi, mobilitas penduduk, teknologi informasi, komunikasi dengan berbagai dampaknya yang bersifat positif maupun negatif, serta dapat berpengaruh langsung ataupun tidak langsung. Dinamika lingkungan strategis tersebut diatas membawa 4 (empat) perubahan mendasar yaitu perubahan sistem politik, menguatnya ketergantungan antar negara dan ketergantungan pada masalah yang bersifat global, meningkatnya peranan NGO dalam hubungan internasional, agenda internasional dan merupakan issue adalah ; demokratisasi, HAM dan lingkungan hidup. Globalisasi memunculkan persaingan antar region, antar bangsa dan intra bangsa yang menimbulkan kecenderungan pragmentasi pada bangsa-bangsa yang ditandai persaingan pada latar belakang primordial, etnik dan agama. Doktrin politik negara barat seperti perdamaian, demokratis, politik luar negeri yang etis dan intervensi kemanusiaan cenderung meremehkan faktor kedaulatan nasional. Bangsa kita sering berhadapan dengan gejala internasionalisme baru ini dalam berbagai bentuk dan tekanan yang diagendakan di forum-forum multilateral dan diterapkan secara spesifik. Sehingga pada akhirnya berpengaruh kepada faham kedaulatan nasional yaitu,

faham nasionalisme dan patriotisme cenderung mengalami proses pencairan dan pelongsoran.

Dalam menyikapi globalisasi tersebut diatas, bangsa Indonesia pun mengalami proses reformasi menuju Indonesia Baru yang bertujuan mengatasi krisis ekonomi, mewujudkan kedaulatan rakyat, penegakkan hukum dan HAM serta reformasi pembangunan agama dan sosial budaya. Nampaknya tujuan reformasi harus menembus krisis akumulatif dan multidimensi yang telah melahirkan kondisi Pancaroba dan menempatkan bangsa Indonesia pada situasi yang serba dilematis. Tuntutan akan adanya pemerintahan yang demokratis dalam berpolitik, kemakmuran ekonomi, kebebasan, penegakkan hukum dan HAM menyiratkan bahwa kekuasaan yang dimiliki pemerintah pada hakekatnya amanah dan kepercayaan dari rakyat, sementara penyimpangan yang berbau KKN, konsumerisme tetap berlanjut. Pertikaian elit politik menjadi topik nasional bahkan internasional, implementasi desentralisasi diwujudkan dalam bentuk otonomi daerah sementara gerakan separatisme memanfaatkan peluang era tersebut, maka konflik yang terjadi menjadi lengkaplah sudah yaitu konflik vertikal dan konflik horisontal yang jelas-jelas mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

15. Global.

Berubahnya peta politik dunia dari dua kutub menjadi beberapa kutub, sebagai akibat dari runtuhnya negara Uni Soviet dan juga Yugoslavia sejak berakhirnya perang dingin antara Blok Barat dan Timur, yang juga berarti runtuhnya satu kekuatan ideologi yang sangat kokoh sebelumnya, yaitu ideologi

Komunis, berpengaruh besar pada berkembangnya ide dan nilai-nilai yang berasal dari barat, yaitu kapitalisme, liberalisme dengan isu-isu demokratisasi, hak asasi dan lingkungan hidup. Paham-paham ini cepat sekali berkembang ke seantero dunia, mengisi sebagian besar tempat yang sebelumnya ditempati oleh paham sosialis komunis.

Proses penetrasi paham-paham ini membawa kecenderungan yang kuat dari negara-negara asalnya untuk berpartisipasi aktif memberikan tekanan, kemudahan dan kompensasi-kompensasi menguntungkan bagi negara-negara penerima. Namun, di beberapa negara yang sebelumnya sudah memiliki resistensi tinggi, proses demikian ini sangat sulit dan alot. Bahkan di beberapa negara berkembang yang sedang dalam proses menentukan ideologinya sendiri, proses ini bahkan banyak menimbulkan pertentangan dalam negeri, yang bahkan berakibat langsung atau tidak langsung pada wilayah regionalnya.

Berkembangnya issue HAM, lingkungan hidup dan demokratisasi telah merubah tatanan kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya bangsa-bangsa di dunia, bahkan issue-issue tersebut telah dimanfaatkan oleh negara-negara besar sebagai alasan menekan negara-negara yang sedang berkembang.

Perubahan tata ekonomi dunia hanya untuk meningkatkan kegiatan perekonomian dunia yang didominasi oleh negara-negara besar walaupun telah dibentuk kerjasama bilateral, regional tetapi negara-negara besar menetapkan liberalisasi ekonomi menjadi issue sentral, sehingga persaingan antar regional dan bilateral akan berpengaruh kepada ekonomi untuk berkepentingan pada persaingan yang sama. Perubahan sistem politik global untuk berkecimpung

pada persaingan yang sama. Perubahan sistem politik global dari politik luar negeri negara-negara barat seperti perdamaian, demokratis, politik luar negeri yang etis dan intervensi kemanusiaan cenderung menguat yang pada akhirnya dapat mengusik faktor kedaulatan nasional. Selanjutnya peningkatan peran dari aktor-aktor non negara dalam hubungan internasional yang didominasi oleh NGO dan LSM yang ditunjang dengan era informasi dan tranparansi semakin berkecenderungan menggeser sikap nasionalisme, hal tersebut dapat kita ketahui peranan LSM internasional didalam upayanya untuk secara langsung menjembatani konflik dalam negeri yang nyata-nyata bersikap separatis. Campur tangan LSM asing tersebut ada yang bersifat resmi untuk berperan oleh pemerintah, tetapi ada pula LSM asing atau LSM yang didanai negara asing dengan mengemban visi dan misi kebebasan tanpa batas atau reformasi total sangat potensial didalam membentuk dan menciptakan image building yang mengarah kepada disintegrasi. Jika mengacu kepada statement eks Menlu USA Henry Kissinger pada tahun 1975 bahwa "The third war is not the nuclear war, but subversive war" yang kemudian negara Unisoviet pecah-pecah menjadi negara kecil dan Yugoslavia pun pecah menjadi 6 negara kemudian di beberapa kawasan negara Asean pun gonjang-ganjing setelah adanya intervensi si pedagang valas, sehingga berdampak pada krisis ekonomi dan khusus bagi Indonesia berkembang menjadi krisis multi dimensi hingga sekarang tidak atau belum terpulihkan, bahkan efek global dibidang ekonomi walaupun pemerintah mencanangkan ekonomi kerakyatan atau pemberdayaan masyarakat ekonomi yang bersifat mandiri dengan harapan meniadakan ekonomi konglomerasi tetapi

keterbukaan dibidang ekonomi tersebut dapat mengarah kepada disintegrasi karena digulirkannya penyewaan pulau bahkan penjualan aset-aset nasional kepada pihak asing secara langsung, tidak menutup kemungkinan kepemilikan aset nasional secara tidak langsung telah dilaksanakan.

Kiranya tidak berlebihan jika kewaspadaan nasional tidak hanya menghadapi ancaman ideologi belaka, tetapi perlu suatu sikap yang mampu mengidentifikasi efek globalisasi tersebut diatas dari segenap komponen bangsa, dihubungkan dengan adanya upaya terselubung dan terang-terangan dari beberapa daerah untuk memisahkan diri baik menggunakan thema separatisme, memanfaatkan peluang otonomi daerah serta mengambil keuntungan dengan tujuan yang sama dari pertikaian elit politik yang dialami bangsa Indonesia.

16. Regional.

Terbentuknya organisasi regional. Organisasi regional banyak bermunculan seperti North American Free Trade Agreement (NAFTA), Asean Free Trade Area (AFTA), Forum Asia Pasific Cooperation (APEC) dan penyatuan mata uang Eropa menjadi Euro. Organisasi-organisasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan perekonomian negara masing-masing dan kelompoknya. Hal ini akan berakibat kepada persaingan yang menuntut peningkatan kualitas diberbagai perekonomian.

Borderless State. Hilangnya batas-batas negara dalam kaitan ekonomi dunia menyebabkan negara berkembang sulit untuk berkompetisi dengan negara ekonomi kuat, hal ini ditandai dengan begitu besarnya pengaruh pasar modal dan perdagangan uang sebagaimana yang kita alami saat ini.

Dan terbentuknya entitas non negara yang menonjol adalah menguatnya kesadaran dan kesetiakawanan diaspora etnis Cina yang secara regional ini mampu bangkit menjadi kekuatan ekonomi dunia yang harus diperhitungkan, bahkan searah dengan negara kawasan regional lainnya seperti Jepang dan lain-lain. Nampaknya dalam kawasan regional tersebut kiranya Indonesia yang merupakan bangsa yang disegani karena geografi, sumber kekayaan alam dan jumlah penduduknya yang besar belum mampu keluar dari krisis multidimensi, dimana bangsa-bangsa lain dalam kawasan telah dapat menyesuaikan dan keluar dari krisis di dalam negerinya. Situasi politik dalam negeri dengan segala potensi Pancagatryanya secara umum merupakan peluang dan kendala yang harus diatasi sendiri oleh masyarakat bangsa yang belakangan ini disintegrasi bangsa telah berada diambang pintu, sedangkan lingkungan regional nampaknya berpengaruh netral, atau hanya bersifat mediator belaka jika masalah dalam negeri telah masuk kepada bidang stabilitas keamanan. Karena pada hakekatnya kawasan regional akan terpengaruh langsung ataupun tidak langsung jika bangsa yang besar seperti Indonesia mengalami instabilitas keamanan yang serius. Tersebut diimplementasikan dalam bentuk konsultasi, bantuan finansial berupa sumbangan tidak mengikat, dan bentuk kerjasama lainnya yang bernuansa kooperatif.

Sementara itu, upaya-upaya meningkatkan hubungan regional di segala bidang kehidupan antara negara-negara Asia Tenggara yang sebelumnya sama-sama dilanda krisis moneter dan ekonomi, merupakan perjuangan yang berat, yang juga bisa mengguncangkan region-region lainnya di sekitar Asia Tenggara.

Beberapa negara seperti Singapura, Malaysia dan Vietnam yang segera bisa lepas dari krisis, segera kembali mampu memulihkan perekonomiannya, yang berarti pemulihan kondisi nasionalnya, dan segera kembali menjadi perhatian dan sasaran investasi negara-negara bermodal besar. Kembali mereka ikut bersaing dalam kancah internasional pada segala aspek kehidupan. Termasuk didalamnya pada aspek sumber daya manusia, kerja sama ekonomi, pertahanan, dan lain-lain. Aktivitas kelompok negara-negara yang sudah "sehat" inilah yang belum bisa diikuti oleh negara Indonesia. Sehingga, dalam peran regionalnya, Indonesia dewasa ini makin tertinggal dari negara-negara tetangganya. Hal ini berpengaruh langsung kepada kepercayaan investor dan tingkat kerjasama ekonomi yang bisa dipacu untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasionalnya.

17. Nasional.

Kondisi dalam negeri pada saat ini ditinjau dari berbagai aspek sangat memperlihatkan, nampaknya reformasi pembangunan yang menuju kepada terbentuknya Indonesia Baru belum mampu menembus krisis multidimensi yang terjadi di Indonesia, bahkan dalam era reformasi ini pelaku-pelaku Orde Reformasi baik dalam bidang Legislatif, Yudikatif, dan Eksekutif serta kepemimpinan para elit politik nasional semakin menembus kepada sisi kegelapan yang belum diketahui ujungnya, walaupun kita ketahui adanya istilah "Habis Gelap Terbitlah Terang". Kondisi nasional tersebut yang mengarah kepada pemisahan diri dari beberapa daerah nampak dipengaruhi secara langsung ataupun tidak langsung dari beberapa aspek yaitu :

a. Aspek Ideologi.

1) Ideologi Pancasila sebagai azas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dulu merupakan satu-satunya azas, namun pada era sekarang dengan sistem multi partai maka azas Pancasila dapat tidak dicantumkan sebagai azas partai. Di lain pihak azas Pancasila pun penghayatan dan pengamalannya masih belum sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai dasar Pancasila bahkan nampak belakangan nilai-nilai Pancasila sering diperdebatkan yang justru merupakan kerawanan bagi nilai Pancasila itu sendiri sehingga dapat kemungkinan timbulnya rasa tidak percaya dan meragukan ideologi Pancasila sebagai ideologi negara yang merupakan karya luhur dari pendiri Republik ini. Jika hal ini berkelanjutan apalagi diterimanya ideologi Komunis berkembang kembali di Indonesia maka malapetaka disintegrasi ideologi akan menjadi kenyataan.

2) Ideologi Pancasila pun cenderung terganggu dengan adanya kelompok-kelompok tertentu yang berlatar belakang pendidikan barat dan mengedepankan paham liberal atau kebebasan tanpa batas yang diterapkan dalam aspek kehidupan bangsa, demikian pula paham keagamaan yang bersifat ekstrim dapat menggeser ideologi Pancasila.

b. Aspek Politik.

Perkembangan politik dalam negeri saat ini nampak syarat dengan konflik dari para pelaku elitnya, dan berkecenderungan konflik elit tersebut diimplementasikan kedalam pengkristalan massa masing-masing kekuatan untuk beradu di lapangan. Kebijakan multi partai dalam perjalanannya nampak mengarah kepada terbentuknya aliansi-aliansi dan semakin mempersulit pemecahan masalah politik. Kebijakan dalam menyikapi konflik vertikal dan konflik horisontal semakin marak dengan resepsi masing-masing elit politik sementara korban terus berjatuhan.

c. Aspek Ekonomi.

Kebijakan ekonomi yang salah. Kebijakan ekonomi yang mengutamakan pertumbuhan dengan mengabaikan pemberdayaan masyarakat ekonomi lemah turut merusak sendi-sendi perekonomian nasional, lebih jauh menimbulkan kesenjangan sosial yang semakin tajam dan meningkatkan secara drastis jumlah pengangguran. Kiranya kronisme dan penciptaan konglomerasi dengan penguasaan kekuatan ekonomi pada hanya segelintir orang saja dan menggurita pada skala nasional dan internasional, tetapi tidak didukung dengan profesionalisme intreprenur atau kewira-usahaan sejati, maka hal tersebut menjadi faktor utama instabilitas bidang ekonomi. Dan jika krisis ekonomi nasional yang kita hadapi sekarang ini tetap berlarut maka akan menjadi percikan awal dari suatu proses disintegrasi bangsa karena krisis lainnya secara otomatis akan bergulir mengikuti krisis ekonomi tersebut dan biasanya pemulihannya memerlukan waktu yang cukup lama.

d. Aspek Sosial Budaya.

1) Kebhinekaan bangsa Indonesia masih diwarnai sikap primordial dan kesukuan serta keagamaan atau lazim disebut SARA sangat potensial untuk menciptakan konflik. Pengaruh eksternal yang berupa gejolak etnisitas di dunia berupa pertentangan suku dan separatisme dapat menjadi pengaruh terhadap aspek sosial budaya bangsa. Pada situasi terakhir konflik etnis yang terjadi mampu mempengaruhi opini dunia terhadap sosial budaya bangsa Indonesia yang sebelumnya dikenal santun, sopan dan ramah tamah berbalik menjadi bangsa yang dinilai Bar Bar bahkan melebihi kekejaman pertikaian atau konflik di negara-negara Afrika.

2) Otonomi daerah yang tidak disertai dengan sikap nasionalisme dan kebangsaan yang tinggi akan berdampak kepada semakin lebarnya jurang perbedaan sosial budaya masing-masing daerah dan menumbuhkan sikap arogansi kesukuan, hal tersebut dipengaruhi pula oleh kemajuan komunikasi informasi serta keterbukaan yang berpengaruh langsung kepada sikap dan perilaku sosial budaya masyarakat di daerah.

e. Aspek Hankam.

Kebijakan pemerintah dalam penegakkan hukum dan HAM serta demokrasi serta merta membebaskan semua tahanan politik dan narapidana politik serta nyaris mengakui eksistensi Komunisme di

Indonesia didukung pula oleh pemisahan TNI dan Polri maka dampaknya adalah berkembangnya gerakan separatis GAM di Aceh dan gerakan separatis OPM di Irian Jaya. Pertikaian elit politik yang diimplementasikan kedalam bentuk penciptaan kerusuhan dan pembunuhan-pembunuhan semakin menumbuhkan rasa dendam dan sakit hati antar sesama anak bangsa, demikian pula kebijaksanaan otonomi daerah yang tidak disertai dengan kemampuan pengelolanya serta kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat maka kecenderungan memisahkan diri semakin mengkrystal. Kondisi keamanan akhir-akhir ini yang cukup memperhatikan sangat merugikan masyarakat bangsa dan pada akhirnya berpengaruh terhadap pandangan dunia internasional terhadap jatidiri bangsa Indonesia.

18. Peluang dan Kendala.

a. Peluang

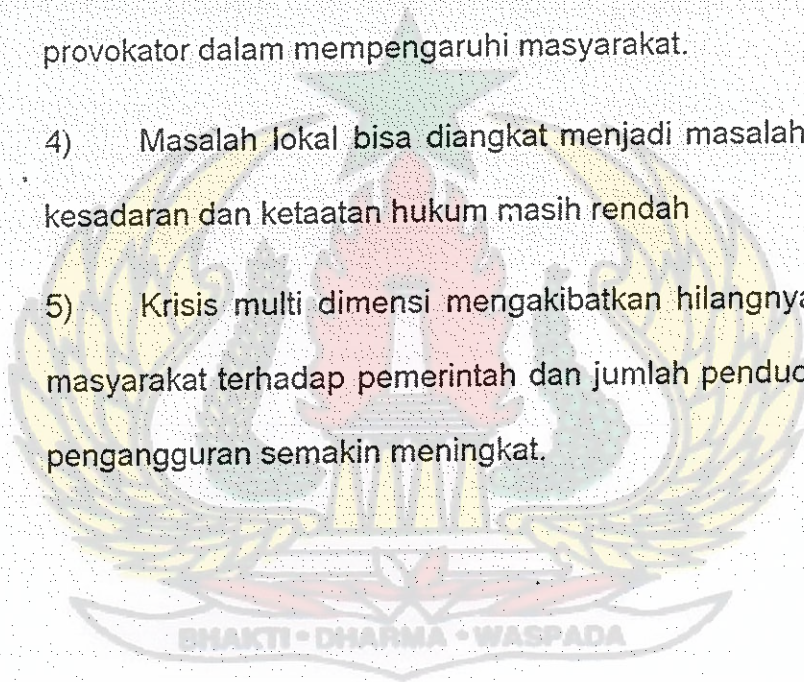
- 1) Perjuangan bangsa Indonesia untuk memperoleh kemerdekaan yang amat panjang, Sumpah Pemuda 1928, perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan 1945, masih memberikan semangat persatuan dan kesatuan bangsa kepada sebagian besar masyarakat Indonesia.
- 2) Masyarakat internasional pada umumnya lebih menghendaki keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti halnya pernyataan pemerintah Amerika Serikat.

- 3) Elit politik, tokoh masyarakat dan cendekiawan pada umumnya memahami pentingnya kesatuan bangsa dalam menyongsong masa depan bangsa ditengah-tengah persaingan global.
- 4) Dunia internasional terbuka bagi kerjasama dalam berbagai bidang, bahkan daerah.
- 5) Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat digunakan untuk mempercepat proses peningkatan kesejahteraan dan keamanan.
- 6) Reformasi disegala bidang, dengan perbaikan sistem politik nasional yang lebih aspiratif dengan memperhatikan hak-hak rakyat yang lebih merefleksikan sistem demokrasi yang diinginkan dan HAM.
- 7) Penyempurnaan berbagai undang-undang yang lebih menguntungkan masyarakat banyak dan daerah.

b. Kendala.

- 1) Persepsi keberadaan Komunis di Indonesia berbeda dengan Komunis dunia atau di negara-negara lainnya, dalam hal pembubaran Partai Komunis Indonesia yang kita ketahui berdarah-darah tidak menutup kemungkinan jika PKI kembali dilegalisir kesempatan tersebut dimanfaatkan untuk melampiaskan dendam yang terkubur selama ± 32 tahun.

- 2) Krisis ekonomi dan kesenjangan sosial telah memicu ego kesukuan dan kedaerahan menjadi muncul kepermukaan dan tidak menutup kemungkinan diikuti oleh permasalahan lainnya yang berakhir pada terjadinya konflik.
- 3) Elit politik menggunakan issue kesenjangan sosial dan ego kesukuan/kedaerahan bagi kepentingan politiknya. Kondisi ini diperparah oleh tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah, demikian pula kesadaran politiknya sehingga memudahkan provokator dalam mempengaruhi masyarakat.
- 4) Masalah lokal bisa diangkat menjadi masalah internasional, kesadaran dan ketaatan hukum masih rendah
- 5) Krisis multi dimensi mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan jumlah penduduk miskin dan pengangguran semakin meningkat.



BAB V TANTANGAN MASA DEPAN

19. Umum.

Sebuah negara disebut *integrated* jika wilayahnya utuh, tidak ada pertikaian ideologis yang mendalam dan kehidupan sosialnya rukun dan harmonis. Uni Soviet dan Yugoslavia gagal mempertahankan keutuhan teritorialnya karena separatisme. Di negeri kita dulu, Majapahit dan Mataram setelah melewati masa kejayaannya, juga akhirnya runtuh karena menyusutnya kekuatan pemerintah pusat dan tak terbendung gerakan pemisahan diri.

Perbedaan ideologis banyak memisahkan sebuah bangsa. Cina dan Taiwan, Korea Utara dan Korea Selatan, serta Jerman Barat dan Jerman Timur misalnya, pada masa lalu adalah contoh dari bangsa yang satu, yang dipisah oleh perbedaan ideologi. Di Asia pun kita pernah menyaksikan disintegrasi, kemudian reintegrasi dengan menunjuk Vietnam karena masalah ideologi dan sistem politik. Demikian pula, permasalahan domestik Kamboja yang hingga kini belum juga mapan.

Integrasi sosial acap kali juga menjadi barometer kuatnya integrasi nasional. Negara yang amat heterogen, seperti Indonesia. Negara yang amat tantangan besar dalam membangun persatuan, harmoni dan kerukunan hidup masyarakat. Konflik etnopolitis dan religiopolitis sering menyulut terjadinya, dan bahkan, perang saudara di beberapa negara. Yugoslavia kembali menjadi contoh yang tepat. Demikian pula apa yang kita ikuti bertahun-tahun di Irak,

Lebanon, Afganitan, Myanmar, Srilanka, Filipina, Rwanda, Somalia, dan banyak lagi, tiada lain adalah konflik yang berangkat dari faktor etnis ataupun agama.

Menyimak pengalaman dan potret negara-negara lain tersebut, Indonesia barangkali tidak terlalu cemas. Amat berlebihan jika kita mengatakan Indonesia tengah bergerak kearah diintegrasikan. Indonesia tentu bukan Uni Soiet atau pun Yugoslavia. Tetapi, tentu kita juga tidak boleh underestimate dan terlalu percaya diri, bahwa ini akan tetap kompak dan bersatu. Bagaimanapun kita harus melakukan upaya nasional yang sungguh-sungguh untuk mencegah disintegrasi di negara kita.

20. Tinjauan Masa Kini dan Masa Mendatang.

Nampaknya, dipenghujung abad 20 tantangan terhadap ideologi negara juga bukan hanya berasal dari faktor domestik, tetapi juga internasional. Gelombang demokratisasi, HAM, liberalisme, serta universalisme dan globalisme telah menembus dan merasuki cara pandang dan cara berpikir masyarakat Indonesia. Hal demikian bisa "meminggirkan" ideologi negara Pancasila ; dan sebaliknya, bisa menghadirkan sistem nilai dan idealisme baru yang dianggap sesuai dengan tantangan dan kebutuhan zaman.

Dalam suasana demikian, bisa saja solidaritas global menggeser kesetiaan nasional. Internasionalisme menggeser nasionalisme. Itulah pentingnya selalu mempertahankan sifat terbuka dari ideologi Pancasila dengan pemaknaan yang terus dikemaskinikan, agar bangsa Indonesia dapat terus menerima Pancasila sebagai landasan dan pandangan hidup, sekaligus perekat bagi kehidupan politik kebangsaan.

Kedepan, jangan kita jauhkan nilai-nilai luhur Pancasila dengan realitas kehidupan masyarakat. Mari kita jadikan Pancasila sebagai kendali moral dan etika ; dan bukan akar jastifikasi terhadap format kekuasaan dengan kepentingan politik. Kalau ini terwujud, rakyat Indonesia akan mencintai ideologi negaranya dan menolak hadirnya ideologi lain yang justru diduga akan menimbulkan perpecahan.

Gerakan separatisme sering tidak berangkat dari idealisme untuk merdeka sendiri, bebas dari ikatan wilayah sebuah negara, walaupun gerakan separatisme titik sentral idenya adalah untuk merdeka dan terlepas dari NKRI, tetapi kekuatan mayoritas dari gerakan tersebut merupakan akumulasi dari akibat ketidakpuasan yang mendalam terhadap bagaimana pemerintah pusat atau "sang mayoritas" memperlakukan sebuah wilayah atau kelompok minoritas. Issue-issue sentral yang kerap muncul lazimnya berkisar pada hubungan pusat – daerah, masalah otonomi daerah, keadilan, keseimbangan pembangunan, pemerataan dan hal-hal yang sejenis.

Jika terdengar protes keras dari Riau, Irian Jaya dan Aceh, setelah terlepasnya Timor Timur dari pangkauan Ibu Pertiwi, dan pada skala yang jauh lebih kecil dari berbagai tuntutan daerah yang lain, harus kita lihat secara jernih dan arif. Adalah benar bahwa pemerintah dan bangsa Indonesia tidak akan pernah memberikan toleransi kepada salah satu wilayahnya untuk memisahkan diri. Kedaulatan dan kehormatan bangsa tentu harus kita pertaruhkan, dan segala harga harus kita bayar guna menghentikan kegiatan pemisahan diri ini. Separatisme biasanya menggelar front perjuangan yaitu front bensenjata, front

klandestine, front politik, dan belakangan menggelar front penggalangan dan menggerakkan massa sebagai unsur penekan, mereka punya bendera, punya organisasi pemerintahan (invisible government) punya lagu kebangsaan dan punya wilayah. Biasanya separatisme selalu akan bersifat perjuangan berlarut. Sedangkan gejala disintegrasi lainnya yang bersumber dari kebijakan otonomi daerah atau akibat dari pertikaian elit politik, bernuansa SARA dan berperilaku saling menghabisi dengan korban yang besar tetapi sifatnya sementara dan pada saatnya jiwa kebangsaan mereka kembali pada titik normal. Saya kira, menunjuk negara lain pun semisal Inggris, tidak akan pernah rela melepas Irlandia Utara. Malaysia tidak akan pernah menyetujui jika Sabah memilih berdiri sendiri. Amerika Serikat pun tentu akan menggunakan kekuatan militernya jika tiba-tiba Alaska dan Hawaii ingin melepaskan diri dari perserikatan.

Namun, sudah saatnya kita mendengar secara lebih sungguh-sungguh keluhan, tuntutan dan aspirasi saudara-saudara kita di Aceh, Irian Jaya, Riau dan daerah-daerah lain itu. Marilah kita lihat potret pembangunan di wilayah itu. Marilah kita evaluasi kebijakan dan perlakuan terhadap masyarakat-masyarakat itu. Adakah telah benar-benar menghadirkan keadilan, keseimbangan dan ketepatan pengelolaan yang sebenarnya. Kalau jawabannya, ya, amat kecil kemungkinannya mereka meronta dan berteriak, dan demikian sebaliknya.

Kedepan, sudah saatnya paradigma, konsep kebijakan dan perlakuan terhadap keseluruhan wilayah yang selama ini kurang kita "sentuh" dilakukan penataan ulang. Kita harus menuju ke otonomi daerah yang sejati, yang tidak

saja memberikan ruang gerak lebih luas bagi daerah untuk mengurus kehidupannya sendiri ; akan tetapi, lebih mencerminkan keadilan dan kebesaran sebuah negara kebangsaan yang amat majemuk, berwibawa dalam arti mempunyai kebijaksanaan yang tegas didalam menyikapi kekuatan-kekuatan separatisme yang nyata-nyata bertujuan untuk merdeka sendiri lepas dari pangkuan Ibu Pertiwi, sehingga komitmen kesatuan dan persatuan dengan kesepakatan yang dijiwai demokrasi dan pada akhirnya melahirkan suatu regulasi yang konkrit, tegas dan tepat demi terbinanya integrasi nasional, pada akhirnya mengarah kepada suatu bentuk kepemimpinan yang arif dan efektif.

21. Prospek Tantangan Masa Depan.

Keanekaragaman masyarakat Indonesia merupakan kondisi nyata yang disatu sisi merupakan kekayaan budaya bangsa, namun disisi lain mengandung kerawanan terhadap integrasi bangsa. Baik sebagai kekayaan budaya maupun sebagai sumber kerawanan integrasi bangsa, kedua-duanya merupakan tantangan bagi bangsa Indonesia dalam rangka mencapai tujuan dan cita-cita nasional. Perihal keanekaragaman tersebut, bukanlah hal yang luar biasa, karena bangsa itu terdiri dari bermacam-macam kelompok suku berdasarkan asal muasal mereka, yang disebut kelompok primordial. Masing-masing kelompok memiliki adat kebiasaan, pola tingkah laku, keyakinan religius, mentalitas dan jalan hidupnya sendiri. Penduduk mempunyai sentimen-sentimen yang kuat terhadap bumi tumpah darah dan kaumnya sendiri. Pada umumnya orang akan bereaksi sangat emosional terhadap kawan se daerah, kerabat

sendiri, tempat kelahiran sendiri, bahasa ibu, kebudayaan daerah sendiri, bahasa daerah dan agama sendiri.

Apabila penghayatan individu terhadap sentimen-sentimen primordial sifatnya sedang-sedang saja akan membangunkan nilai-nilai positif bagi individu dan masyarakat, yaitu nilai kesejahteraan bathiniah dan keanekaragaman budaya daerah tersebut menjadi budaya yang amat luhur serta membanggakan.

Apabila sikap kedaerahan, kesukuan, agama, etnis, golongan yang kesemuanya disebut primordial, bersifat ekstrim, kaku, stereotipis dan sempit, maka akan berkembang menjadi fanatisme, chauvinisme, radikalisme, diskriminasi, eksklusivisme, dan bermacam-macam masalah sosial, yang dapat memecah belah integrasi bangsa. Penyebabnya adalah dengan primordialisme sempit banyak dimuati sentimen-sentimen yang kuat, prasangka negatif, iri, dengki, bermusuhan yang berakhir dengan konflik terbuka secara anarkhis.

Menurut Prof. Dr. Franz Magnis Sueseso, Sj pada makalahnya "Persatuan Indonesia, Pancasila, Faham Kebangsaan dan Integritas Nasional" tahun 1994 ; Ancaman terbesar terhadap kesatuan nasional negara-negara di seluruh dunia pada dewasa ini berasal dari primordialisme sebagaimana konflik bersenjata yang pecah di berbagai negara pada pasca perang dingin. Selanjutnya dijelaskan ada dua macam primordialisme yaitu : Primordialisme primer dan primordialisme sekunder. Yang pertama adalah tanda semua masyarakat pramodern dan tidak merupakan masalah yang besar. Masyarakat itu belum terbuka pada wawasan nasional dan wawasan kemanusiaan universal, bukan karena ia menolaknya, melainkan karena belum tersentuh. Primordialisme yang

mengancam kesatuan adalah primordialisme sekunder. Primordialisme sekunder bukan hanya terikat pada lingkungan primer, melainkan dikaitkan dengan sikap menolak terhadap lingkungan lain. Tanda-tanda primordialisme sekunder adalah apapun yang bukan etniknya, atau agamanya dan adat daerahnya, ditolaknyanya, dicurigainya dan sering dibencinya. Ia tidak terharu apabila mengingat tanah air, ia tidak mencintai bangsanya, tidak merasa solid terhadap warga sebangsa yang lain agama atau etnik. Dalam perspektif primordial sekunder ini, sikap hati yang baik, murah hati, memaafkan, keadilan hanya bagi kelompoknya, sedangkan terhadap yang bukan kelompoknya menjadi obyek kecurigaan atau kebencian, dalam kasus ekstrim segala kejahatan boleh saja dilakukan tanpa perasaan salah.

Dimana primordialisme meluas, disana sikap nasionalisme akan memudar. Seorang nasionalisme mencintai bangsanya, rela berkorban bagi negaranya, rela membela sesama suku bangsa tanpa melihat suku atau agama. Sebaliknya seorang primordialis, orang sekampung kenal karena lain suku atau lain agama, dianggap orang asing. Lebih jauh tidak mungkin sebuah bangsa mempertahankan kesatuannya kalau sikap seperti itu menguat.

Secara teoritis untuk mengukur sikap kedaerahan diperlukan analisa hubungan antar suku bangsa yang meliputi ; sumber-sumber konflik, potensi untuk toleransi, sikap dan pandangan dari suku bangsa atau golongan terhadap sesama suku bangsa atau golongan dan tingkat masyarakat.

Ditinjau dari sejarah perjalanan bangsa, bangsa Indonesia adalah bangsa yang amat toleran. Hal ini dibuktikan dengan masuknya budaya apapun ke Indonesia,

a. *Aspek Wilayah.* Kepulauan Indonesia yang terdiri atas perairan, daratan dan dirgantara merupakan satu kesatuan yang utuh dan bulat dengan segala isi dan kekayaannya merupakan ruang hidup, modal dan milik bersama untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa.

Negara Indonesia dalam sejarahnya telah kehilangan Timor Timur yang selama 25 tahun merupakan kesatuan wilayah Indonesia. Penyebabnya karena pemerintah tidak berhasil menyakinkan masyarakat Timor Timur tentang arti integrasi, walaupun Timor Timur telah dibangun sedemikian rupa sampai menimbulkan kecemburuan pulau miskin di selatannya dan pulau Irian Jaya ataupun daerah lain yang karena demi kepentingan bangsa harus bersikap diam saja. Kiranya separatisme faham merdeka memilih lebih baik miskin dan rata dengan tanah daripada tidak merdeka, dan permasalahan dengan segudang persoalan masih harus dihadapi oleh rakyat Timor Timur sendiri. Akibatnya yang pasti adalah disamping meninggalkan masalah yang berkepanjangan berkaitan dengan HAM dan pengungsi, juga telah memberikan dorongan kepada daerah lain untuk melepaskan diri dari NKRI.

Tuntutan pemisahan diri Aceh dan Irian Jaya dengan gerakan separatisnya, gagasan pemisahan diri Riau serta wawasan negara Federal yang berarti negara sendiri-sendiri yang berlangsung, menunjukkan bangsa Indonesia sedang menghadapi ancaman disintegrasi bangsa yang amat serius.

Dari perspektif wilayah dengan segala isinya, penyebab langsungnya adalah karena wilayah tersebut memiliki kekayaan alam yang melimpah, namun kekayaan tersebut digunakan secara tidak berkeadilan, tentang masyarakatnya tidak memperoleh manfaat yang memadai. Sehingga merupakan thema utama bagi gerakan separatisme untuk membangkitkan amarah rakyat sekaligus menggalang rakyat untuk berjuang memihak gerakan separatis. Kita ketahui thema GPK GAM di Aceh yang dijadikan rumor adalah penghapusan Kodam, penutupan pelabuhan Sabang, penutupan jaringan rel kereta api, eksploitasi kekayaan alam dan rakyat hanya menonton dengan penuh kebodohan, ketertekanan dan ketidakmengertian mengapa semua ini harus terjadi.

b. *Aspek Bangsa.* Masyarakat Indonesia yang terdiri atas berbagai suku bangsa, etnis, berbicara dalam berbagai bahasa daerah, serta memeluk dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, merasa senasib sepenanggungan, sebangsa dan setanah air yang membentuk jati diri bangsa, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai tujuan nasional. **WASPADA**

Hal ini bermakna adanya hasrat untuk bersatu karena saling membutuhkan dan bermanfaat bagi diri dan lingkungannya. Juga bermakna bangsa yang majemuk tersebut tidak berjiwa dan bersikap fanatisme kedaerahan serta tidak primordialisme sempit.

Dari prespektif ini, dengan melihat gerakan separatis dan berbagai peristiwa bernuansa SARA dan kedaerahan dalam 2-3 tahun terakhir ini,

antara lain kasus Ketapang, Kupang, Sambas, Kalimantan Tengah, Ambon dan Maluku, khususnya dengan indikasi tindakan anarkhis terhadap suku pendatang yang bukan satu daerah, berlanjut terhadap yang bukan satu agama, menunjukkan sikap primordialisme yang amat kental di beberapa daerah. Hal itu menunjukkan bahwa rasa sebangsa dan setanah air sedang mengalami erosi. Bermakna dalam skala nasional telah mulai tumbuh benih disintegrasi bangsa vertikal maupun horisontal yang amat berbahaya, yang apabila tidak dapat segera diatasi, sama dengan bom waktu yang dapat meledak setiap saat. Penyebabnya : Terdapat berbagai faktor yang dapat mendorong terbentuknya hasrat untuk bersatu dan meninggalkan fanatisme kedaerahan ataupun primordialisme sempit, yaitu kesamaan bahasa, agama dan budaya, kesamaan sejarah atau pengalaman dari masa lampau, sampai kepada keinginan untuk mencapai cita-cita bersama dimasa yang akan datang. Dilihat dari bahasa, walaupun tidak terhitung bahasa daerah, namun bahasa Indonesia sudah membudaya di seluruh tanah air yang berarti masih tetap berfungsi sebagai perekat bangsa. Dilihat dari agama ; sejarah perkembangan agama di Indonesia tidak mengenal pertumpahan darah bahkan menjadi perekat yaitu sesama taat beragama. Berarti ada penyebab lain, bukan faktor agama. Ditinjau dari faktor kesejarahan, karena generasi sekarang tidak mengalami secara langsung merebut dan mempertahankan kemerdekaan, maka rasa senasib sepenanggungan sekarang inilah yang tidak ada yang disebabkan oleh rasa ketidakadilan

yang ditandai oleh kesenjangan sosial yang amat dalam. Sedang rasa bangga sebagai bangsa yang tertanam sejak memperoleh kemerdekaan mulai luntur seolah-olah tidak peduli lagi akibat tuntutan kebutuhan selama krisis multi dimensi.

c. *Aspek Politik.* Kehidupan politik yang demokratis dan konstitusional dengan menumbuhkan partisipasi daerah, serta politik luar negeri yang bebas aktif dalam menjamin kepentingan nasional untuk mencapai tujuan nasional.

Hal ini bermakna dijaminnya hak-hak politik tiap individu dan kelompok secara berkeadilan sesuai konstitusi. Dan penyelenggara Negara melaksanakan misi negara secara konsekwen dan konsisten sebagaimana diamanatkan oleh Pembukaan Undang Undang Dasar 1945.

Sejak berakhirnya pemerintahan Orde Baru, reformasi berjalan secara demokratis konstitusional dengan terbentuknya pemerintahan yang legitimate. Secara politis telah memberikan hak-hak politik kepada tiap individu, kelompok dan daerah. Dengan demikian dari perspektif politik telah berjalan dalam rel integrasi bangsa. Namun sayangnya bekas-bekas kebijakan politik masa lalu yang otoriter, korup melanggar HAM, berbekas amat mendalam (tidak dilaksanakannya misi negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 secara konsekwen dan konsisten), sehingga demokrasi yang digulirkan diterjemahkan oleh masyarakat sebagai kebebasan tanpa batas sehingga terjadilah debat

politik terbuka berisi penghujatan, lupa kepada tantangan masa depan. Parpol yang terbentukpun dan ikut Pemilu sejumlah 48 dan Kabinet yang dibentuk disebut Kabiner Persatuan yang faktanya adalah hasil kompromi. Secara teoritis amat wajar kalau Kabinet tersebut amat sulit untuk kompak, sulit untuk sepenuhnya berorientasi kepada kepentingan nasional karena sedikit atau banyak akan membawa misi partai. Hal ini terbukti dengan hak prerogatif Presiden untuk menunjuk Kabinet dipersoalkan bahkan diancam. Hal itu juga menunjukkan bahwa nasionalisme di antara elit politik patut dipertanyakan, apalagi pengikutnya yang secara transparan dengan kekuatan massa rela berbuat apa saja demi *Sang Tuan* di balik layar. Disisi lain, krisis ekonomi yang berkepanjangan, membuat masyarakat tidak sabar, menimbulkan disintegrasi sosial dan hukum, sehingga dapat terjadi titik balik yang akan mengancam demokrasi itu sendiri dalam bentuk pemaksaan oleh pemerintah karena keterpaksaan untuk menyelamatkan negara.

d. *Aspek Ekonomi.* Kehidupan ekonomi nasional dan daerah yang dikembangkan secara terbuka, adil dan diarahkan agar memiliki daya saing dan kemandirian untuk menjamin sebesar-besarnya kemakmuran rakyat serta mewujudkan kesejahteraan umum.

Hal ini bermakna adanya kehidupan dan harapan hidup yang berkeadilan dan lebih sejahtera yang juga ditandai dengan batas toleransi kesenjangan yang wajar baik antar individu, kelompok dan antar daerah.

Dilihat dari perspektif keadilan dan kesejahteraan, saat ini masyarakat umum justru sedang dilanda perasaan ketidakadilan, dan kecemburuan sosial, merasa tidak sejahtera dan lunturnya harapan lebih baik dimasa depan. Kemiskinan dan ketimpangan antara kaya dan miskin yang amat dalam ditambah pengangguran yang amat banyak dengan masa depan tidak jelas mengakibatkan masyarakat sangat mudah berbuat anarkhis. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa bangsa dihadapkan kepada awal disintegrasi horisontal akibat faktor kesejahteraan yang tidak berkeadilan.

e. *Aspek Sosial Budaya.* Budaya bangsa yang dinamis bertumpu pada budaya daerah sebagai wujud ke-Bhineka Tunggal Ika-an, serta mengakomodasikan budaya lain yang tidak bertentangan dengan nilai budaya bangsa Indonesia, serta mengikis budaya yang kontra produktif untuk menciptakan tujuan kemajuan masyarakat dan bangsa Indonesia secara seimbang dan selaras, dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip HAM, membina kesadaran, ketertiban dan ketaatan hukum sesuai tuntutan jaman. Hal ini juga bermakna tidak ada sikap fanatisme kedaerahan ataupun primordialisme sempit.

Ditinjau dari sudut budaya bangsa yang bertumpu kepada budaya daerah, pada saat ini dalam kondisi budaya daerah mulai luntur, sementara budaya bangsapun belum menemukan jatidirinya. Bahkan dalam 2 tahun terakhir yang tampak justru hancurnya moral dan etika bangsa dengan indikasi berbagai tindakan anarkhis dan melawan hukum

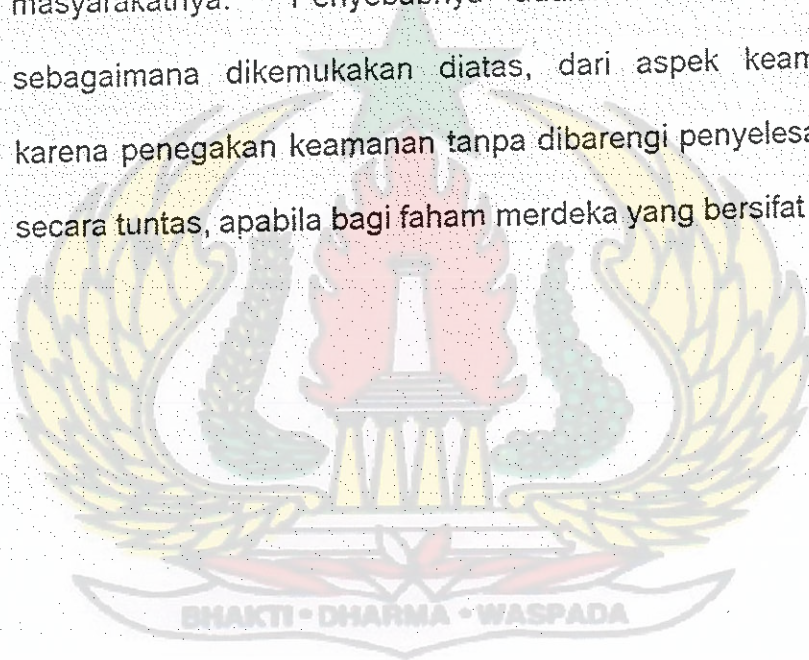
serta main hakim sendiri secara masal (social disorce), yang disertai penganiayaan dan pembunuhan hampir disemua daerah. Kasus-kasus pembakaran perkampungan dan pengusiran transmigran, pendatang di Aceh, Sambas, Kalteng, Maluku, Ambon dan Irja (Wamena) menunjukkan fakta fanatisme kedaerahan atau primordialisme sempit.

Penyebabnya amat kompleks, bersangkutan naut dengan faktor pendidikan umum dan agama, faktor penegakkan hukum, faktor perubahan nilai budaya masyarakat petani tradisional ke budaya masyarakat industri modern yang amat drastis (shock budaya), faktor keinginan dan kenyataan dll. Hal ini jauh lebih dalam dari hanya sekedar gejala disintegrasi, namun merupakan lampu merah bagi jatidiri bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya sebagai bangsa yang beradab.

f. *Aspek Pertahanan dan Kemanan.* Tatanan penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara yang bertumpu pada keterpaduan upaya seluruh rakyat serta pengerahan segenap potensi nasional, yang dilakukan secara semesta dengan semangat tidak kenal menyerah demi tetap utuh dan berdaulatnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, terciptanya keamanan dan ketentraman segenap lapisan masyarakat, serta terciptanya kawasan yang aman dan damai.

Hal ini juga bermakna bahwa konflik vertikal dan atau horisontal yang selalu akan terjadi harus dapat diakomodasikan dan dikendalikan dalam tingkat dan batas waktu tertentu. Juga bermakna dilindunginya setiap warga negara Indonesia dari pelanggaran HAM oleh siapapun.

Kondisi saat ini justru sangat mengkhawatirkan, stabilitas keamanan dalam keadaan goyah, hukum amat sulit ditegakkan, rasa aman sebagai kebutuhan pokok bagi siapapun di beberapa daerah dan di ibu kota mulai memudar. Masalah keamanan di Aceh, Maluku, Ambon dan Irian Jaya apabila tidak dapat segera dituntaskan mengakibatkan dua hal pokok. *Pertama* menjadi masalah internasional. *Kedua* nilai sebagai ketidakmampuan negara dalam melakukan salah satu misi utamanya yaitu melindungi dan menciptakan keamanan serta ketentraman masyarakatnya. Penyebabnya adalah akumulasi berbagai kondisi sebagaimana dikemukakan diatas, dari aspek keamanan terutama karena penegakan keamanan tanpa dibarengi penyelesaian akar masalah secara tuntas, apabila bagi paham merdeka yang bersifat separatis.



BAB VI KONSEPSI PENCEGAHAN

22. Umum.

Bangsa Indonesia dalam 3 (tiga) tahun terakhir ini dibayang-bayangi oleh pecahnya persatuan bangsa dan kesatuan wilayah Nusantara. Timor Timur telah lepas dan menuju menjadi negara Timor Leste walaupun masih menyimpan masalah, Aceh dengan sipil bersenjata yang menyebut dirinya GAM (Gerakan Aceh Merdeka) giat melaksanakan gerakan separatisme menuntut pemisahan diri dari NKRI. Irian Jaya dalam kongresnya pada awal Juni 2000 menyatakan diri lepas dari NKRI. Riau melontarkan gagasan Riau Merdeka, samar-samar dan sayup terdengar suara Borneo Raya, dan Madura merdeka. Sementara itu konflik horizontal dengan tindakan kekerasan yang sangat anarkis di Ambon, Maluku, Poso dan Kalimantan terus berlanjut. Hal tersebut diatas memerlukan pengkajian yang mendalam, seberapa besar ancaman disintegrasi bangsa yang terjadi, faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebabnya, sejauh mana primordialisme dan fanatisme kedaerahan yang terkandung didalamnya, sejauhmana nasionalisme bangsa yang masih ada, peran elit politik yang seharusnya rasional kemudian peranan kelas menengah yang masih tradisional membawahi akar rumput masyarakat yang masih bersifat primordial bagaikan rumput ilalang kerontang, maka konflik begitu mudahnya disulut dan berkobar.

Kebijaksanaan otonomi daerah pun memunculkan konflik internal akibat dari ketidak-seimbangan masing-masing daerah didalam menyikapi otonomi yang bertujuan menghilangkan azas sentralitas berlebihan selama 32 tahun. Sosialisasi perundang-undangan serta sikap daerah yang dipengaruhi berbagai faktor pada akhirnya menimbulkan konflik horizontal walaupun dalam skala lunak dan relatif kecil. Pengaruh dominan dari perubahan atau reformasi yang berlaku sekarang adalah demokrasi tanpa batas atau kebebasan yang mengesampingkan budaya luhur bangsa, dipicu oleh penderitaan dan kemiskinan akibat krisis ekonomi dimana data pengangguran terakhir berjumlah kurang lebih seratus juta dan akan bergulir bertambah banyak, tersebut melengkapi keterpurukan bangsa ini menjadi lebih dalam. Kiranya kebijaksanaan dan strategi yang berdimensi ruang dan waktu dalam hal ini jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, serta prioritas penanganan wilayah dengan memperhatikan faktor keutuhan bangsa harus diambil oleh pemerintah demi kelangsungan hidup NKRI.

23. Kebijakan.

Membangun dan mempertahankan integrasi nasional adalah "unfinished agenda" yang dilaksanakan dengan membangun dan menghidupkan komitmen untuk bersatu, membangun jiwa musyawarah dalam kerangka demokrasi, membangun kelembagakan yang menyuburkan persatuan dan kesatuan, merumuskan regulasi dan undang-undang yang konkrit, serta membutuhkan kepemimpinan yang arif dan efektif. Untuk melakukannya diperlukan konsistensi, kesungguhan dan sekaligus kesabaran. Agar upaya pembinaan

(yang tidak hanya dilakukan oleh pemerintah) ini efektif dan berhasil, diperlukan pula tatanan, perangkat dan kebijakan yang tepat.

Framework yang hendak kita bangun dalam upaya memperkuat integrasi nasional paling tidak menyangkut lima faktor penting.

Pertama, membangun dan menghidupkan terus komitmen, kesadaran dan kehendak untuk bersatu. Perjalanan panjang masa Indonesia untuk menyatukan dirinya, sebutlah mulai Kebangkitan Nasional 1908, Sumpah Pemuda 1928, Proklamasi Kemerdekaan 1945 dan rangkaian upaya menumpas pemberontakan dan separatisme harus terus dihadirkan dalam hati sanubari dan amal pikiran bangsa Indonesia.

Kedua, menciptakan kondisi dan membiasakan diri untuk selalu membangun konsensus. Kompromi dan kesepakatan adalah jiwa musyawarah dan sesungguhnya juga demokrasi. Bagi Indonesia yang amat majemuk, iklim dan budaya demikian amat diperlukan. Tentunya penghormatan dan pengakuan kepada mayoritas diperlukan, sebaliknya perlindungan terhadap mayoritas tidak boleh pula diabaikan. Yang kita tuju adalah harmoni dan hubungan simentris, dan bukan hegemoni. Oleh karena itu premis yang mengatakan "*The minority has its say, the majority has its way*", harus kita pahami secara arif dan kontekstual. Dan jika kita sepakat bahwa demi keadilan sang mayoritas perlu mendapat tempat dan peran yang tepat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka peran itu kiranya dapat diabdikan untuk memperkuat persatuan, menaburkan keadilan dan memajukan kehidupan seluruh masyarakat.

Ketiga, membangun kelembagaan (pranata) yang berakarakan nilai dan norma yang menyuburkan persatuan dan kesatuan bangsa. Menyuburkan integrasi nasional tidak hanya dilakukan secara struktural tetapi juga kultural. Pranata ini kelak harus mampu membangun mekanisme peleraian konflik (conflict management) guna mencegah kecenderungan langkah-langkah yang represif untuk menyelesaikan konflik, dan represif approach digunakan jika persuasive approach dinyatakan gagal.

Keempat, merumuskan kebijakan dan regulasi yang konkret, tegas dan tepat dalam aspek kehidupan dan pembanguann bangsa, yang mencerminkan keadilan bagi semua pihak, semua wilayah. Kebijakan otonomi daerah desentralisasi, keseimbangan pusat – daerah, hubungan simetris, mayoritas – minoritas, perlindungan kaum minoritas, pemberdayaan putra daerah dan lain-lain pengaturan yang sejenis amat diperlukan. Disisi lain undang-undang dan perangkat regulasi lain yang lebih tegas agar gerakan separatisme, perlawanan terhadap ideologi negara, dan kejahatan yang berbau SARA tidak berkembang dengan leluasa, harus dapat kita rumuskan dengan jelas. Dan yang paling penting regulasi itu harus secara konsisten dan konsekuen dilaksanakan di lapangan.

Kelima, upaya bersama dan pembinaan integrasi nasional memerlukan kepemimpinan yang arif dan efektif. Setiap pemimpin di negeri ini, baik formal maupun non formal, harus memiliki kepekaan dan kepedulian yang tinggi, serta upaya yang sungguh-sungguh untuk terus membina dan memantapkan integrasi nasional kita. Kesalahan yang lazim terjadi adalah, kita sering berbicara tentang

kondisi obyektif dari kurang kukuhnya integrasi nasional di negeri ini serta setelah itu "bermimpi" tentang kondisi yang kita tuju (end state), tetapi kita kurang tertarik untuk membicarakan proses dan kerja keras yang harus kita lakukan. Kepemimpinan yang efektif disemua lini, akhirnya merupakan faktor penentu yang bisa menciptakan iklim dan langkah bersama untuk mengukuhkan integrasi nasional ini. Frame work kelima langkah tersebut tentunya harus diikuti dengan strategi yang berdimensi ruang masalah dan waktu, sehingga perlu langkah-langkah jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Dalam menyikapi permasalahan mencegah keinginan beberapa daerah untuk memisahkan diri dalam bingkai NKRI. Menyikapi permasalahan separatisme tentunya dalam jangka pendek harus mampu meredam, menetralsir dan mengikis ide tersebut oleh pemerintah pusat, karena pemerintah daerah diwilayah separatisme cenderung ambivalent dan lumpuh, sedangkan untuk jangka sedang perlu langkah rehabilitasi dan sosialisasi wawasan kebangsaan dalam daerah, sedangkan untuk jangka panjang secara simultan penyelesaian ide separatisme dalam wilayah perlu didekati secara komprehensif dan terkoordinasikan, sedangkan strategi penyelesaian konflik akibat pertikaian elit maka seharusnya akar masalahnya yaitu para elit dan jaringannya untuk dapat dinetralsir dengan relatif lebih transparan dengan waktu yang berdimensi sangat relatif. Demikian pula konflik yang diakibatkan oleh masalah otonomi daerah.

Jalan kearah terbangunnya integrasi nasional agaknya cukup panjang, dengan segala tantangan dan permasalahannya. Tantangan itu juga bukan hanya berasal dari dalam negeri karena masih banyaknya benih-benih konflik

dilingkungan masyarakat, tetapi juga dari luar negeri yang karena dampak globalisasi dapat memunculkan konflik nilai dan konflik kepentingan, sehingga keinginan beberapa daerah untuk memisahkan diri dari pangkuan Ibu Pertiwi merupakan refleksi kewajaran seiring dengan perubahan zaman dengan akumulasi permasalahannya. Kiranya apapun yang terjadi maka NKRI merupakan suatu keputusan bangsa yang bersifat final dan tuntas.

24. Strategi Pencegahan dan Upaya.

a. Dalam rangka membangun dan menghidupkan komitmen untuk bersatu dalam memerangi setiap upaya pemisahan diri dari NKRI, dipilih upaya sebagai berikut:

- 1) Menanamkan nilai-nilai Pancasila, jiwa sebangsa dan setanah air dan rasa persaudaraan, agar tercipta kekuatan dan kebersamaan di kalangan rakyat Indonesia, sehingga inisiatif penolakan dan upaya penumpasan terhadap ide dan upaya separatisme datang dari rakyat di daerah itu sendiri.
- 2) Menghilangkan kesempatan untuk berkembangnya primordialisme sempit pada setiap kebijaksanaan dan kegiatan, agar tidak terjadi KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme), dalam rangka mengikis habis anggapan akan adanya "anak-emas", "anak tiri" ataupun "anak yang dilupakan".
- 3) Meningkatkan ketahanan rakyat dalam menghadapi usaha-usaha pemecah belahan dari anasir luar dan kaki tangannya, agar

seluruh rakyat bisa tetap bersatu dan bahkan berpartisipasi aktif dalam memerangi dan menumpas setiap usaha pemisahan diri dari NKRI, dalam rangka menghindari penggunaan massa untuk tameng hidup dan kedok bagi separatis.

- 4) Penyebaran dan pemasyarakatan wawasan kebangsaan dan implementasi butir-butir Pancasila, dalam rangka melestarikan dan menanamkan kesetiaan kepada ideologi bangsa, agar tertanam nasionalisme yang dilandasi kecintaan kepada bangsa dan negara Indonesia, dan tumbuh ketidak-relaan bila Indonesia terpecah belah.
- 5) Menumpas setiap gerakan separatis secara tegas dan tidak kompromi, untuk menunjukkan kepada masyarakat, bahwa negara tidak mentolelir setiap pemikiran, keinginan apalagi usaha untuk memisahkan diri.
- 6) Membentuk satuan-satuan sukarela yang terdiri dari unsur-unsur masyarakat untuk memerangi separatisme. Peran aparat TNI/Polri dalam upaya ini adalah sebagai mediator dan motivator serta penyelenggara latihan taktis dan tehnik operasional.
- 7) Melarang, dengan melengkapi dasar dan aturan hukumnya, setiap usaha untuk menggunakan kekuatan massa untuk hal-hal yang membahayakan massa itu sendiri. Termasuk dalam hal ini adalah pengerahan massa untuk dibenturkan dengan petugas/aparat.

b. Dalam rangka membangun jiwa musyawarah dalam nuansa kehidupan demokrasi, sebagai bagian dari langkah kompromi dan kerjasama dalam membangun konsensus nasional, dipilih upaya sebagai berikut :

- 1) Rekonsiliasi dalam mencapai kesepakatan dalam rangka demokrasi yang menempatkan kepentingan rakyat diatas segalanya, agar rakyat benar-benar merasa yakin, bahwa kemajuan dan pembangunan yang dilakukan memang untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.
- 2) Menciptakan iklim politik nasional yang damai, saling kooperatif, demokratis dan guyub, agar stabilitas politik bisa terjaga, dalam rangka menanamkan kepercayaan kepada kemampuan pemerintah dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan negara.
- 3) Menyusun sistim kehidupan yang saling menghargai, kerjasama, yang menghormati dan mengakui hak-hak orang lain, agar rakyat merasakan keuntungan memiliki negara kesatuan, sehingga secara alami akan tumbuh ketahanannya kepada ancaman separatis maupun subversive.
- 4) Melakukan upaya-upaya intelijen, teritorial, dilakukan oleh satuan militer dan Polisi yang profesional, untuk mendeteksi, mencegah dan menhancurkan setiap usaha pemisahan diri dari NKRI.

5) Menjauhi/menghindari setiap kondisi dari aspek ideologi, politik, sosbud, ekonomi dan hankam, yang memberi kesempatan kepada berkembangnya suasana dan semangat primordial kesukuan, agama, golongan, dan lain-lain.

6) Meningkatkan kesejahteraan rakyat, dalam kaitan ini, distribusi hasil-hasil pembangunan dan sumber daya alam harus proporsional, dan sebesar-besarnya digunakan untuk kesejahteraan seluruh rakyat, tidak hanya untuk kepentingan pemerintah pusat.

c. Dalam rangka membangun kelembagaan dan sistim kehidupan yang menyuburkan rasa persatuan dan kesatuan, dipilih upaya sebagai berikut :

1) Melaksanakan integrasi nasional secara kultural maupun struktural, agar tertutup celah-celah yang bisa memberi kesempatan untuk praktek-praktek kolusi, korupsi dan nepotisme, dalam rangka menghilangkan kesenjangan sosial dan kecemburuan yang bisa mengurangi keinginan untuk berfikir memisahkan diri dari NKRI.

2) Membangun mekanisme peleraian konflik guna mencegah langkah-langkah represif dan mengedepankan langkah persuasif antisipatif namun tegas dalam rangka mencegah konflik meluas dan mengakibatkan korban yang besar, agar langkah penyelesaian

tersebut tidak menimbulkan bom waktu yang bisa membahayakan dikemudian hari.

3) Melaksanakan setiap upaya penumpasan separatisme ataupun konflik-konflik yang bisa menjurus kepada separatis secara terpadu dan komprehensif oleh seluruh komponen masyarakat, agar tidak tersedia celah yang bisa dimanfaatkan separatis untuk bangun dan eksis kembali.

4) Melaksanakan otonomi daerah sesuai undang-undang yang telah diputuskan, agar masyarakat di daerah mengerti bahwa pemerintah pusat beritikad baik untuk membagi setiap hak dan kewajiban secara proporsional dengan pemerintah daerah, dalam rangka mengurangi wacana/ ide untuk memisahkan diri.

5) Merumuskan kembali peran dan tanggung jawab semua komponen bangsa dalam menghadapi separatisme, agar tercipta opini dan kondisi bahwa hal ini bukan semata-mata urusan TNI dan Polri saja, dalam rangka upaya penumpasan separatis secara terpadu dan menghindari ekses yang bisa sangat merugikan di kemudian hari.

6) Melaksanakan operasi intelijen sebagai langkah penindakan yang tegas dan tidak kenal kompromi terhadap segala bentuk separatis pada tahap dini, agar situasi tidak berkembang meluas dan menyulitkan seperti yang terjadi di Aceh saat ini, sebagai bagian dari penciptaan kondisi dan penanaman kepercayaan

- 2) Menerapkan sistim bottom up dalam proses penentuan kebijaksanaan menumpas separatisme, agar masyarakat yang dipimpinnya rela berpartisipasi, dalam rangka menumbuhkan kewaspadaan dan penolakan terhadap separatisme.
- 3) Meningkatkan kepekaan para pemimpin, baik pemimpin formal maupun non formal, agar mau mendahulukan kepentingan negara diatas kepentingan lainnya, dalam rangka mendapatkan loyalitas rakyatnya dalam melakukan perlawanan sukarela terhadap separatisme di wilayahnya masing-masing.
- 4) Meningkatkan kemampuan intelektual, ketanggap segeraan, dan keberanian mengambil keputusandalam menghadapi segala gejala timbulnya separatisme. Kemampuan ini harus terus diasah dan dipertajam, sehingga peka terhadap perkembangan situasi dan bisa mengantisipasi hal-hal negatif yang mungkin terjadi.
- 5) Senantiasa menunjukkan sikap sebagai seorang pemimpin yang panutan, menghindari kolusi, korupsi dan nepotisme, serta tidak bekerja untuk kepentingannya sendiri.
- 6) Memimpin secara persuasif dan dialogis, serta penerapan "reward ang punishment" yang konsisten dan konsekwen.
- 7) Dalam upaya mencegah separatisme berkembang, selalu melibatkan para tokoh informal, tokoh agama, atau tokoh bayangan di wilayah tersebut, dengan peran yang proporsional.

BAB VII PENUTUP

25. Kesimpulan.

- a. Pemisahan diri bagi mereka yang berfaham separatisme seperti GAM Aceh dan OPM Irija merupakan suatu harga mati untuk merdeka yang memerlukan penanganan jangka panjang dengan pendekatan yang arif namun tegas walaupun aspek hukum, keadilan dan sosial budaya merupakan faktor berpengaruh dan perlu pemikiran tersendiri.
- b. Pemberlakuan otonomi daerah merupakan peluang untuk kemandirian lokal namun berpotensi untuk menciptakan mengentalnya heterogental dibidang SARA dan berujung pada terjadinya suatu konflik dan lebih jauh lagi, potensi untuk memisahkan diri dari Indonesia.
- c. Pertarungan elit politik yang diimplementasikan kedalam bentuk penggalangan massa jika tidak diantisipasi dengan arif dan tegas dapat menimbulkan benturan fisik berkepanjangan dengan korban besar, penciptaan terror massa secara hukum sulit dibuktikan karena pelaku atau yang mengatur bergerak di luar jangkauan hukum, maka perlu penggunaan satuan aparat keamanan yang mampu mengimbangi gaya dan pola pelaku dan penggerak massa, tindakan tegas yang berani, dalam hal menempuh resiko sangat diperlukan.
- d. Leadership dari tingkat elit politik nasional hingga kepemimpinan daerah, sangat menentukan peredaman konflik pada skala dini,

sedangkan peredaman konflik pada skala kejadiannya memerlukan tingkat profesionalisme aparat keamanan secara terpadu dan tidak memihak.

e. Efek global, regional dengan faham demokrasi yang bergulir keras dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, perlu diantisipasi dengan penghayatan wawasan kebangsaan bagi seluruh anak bangsa melalui edukasi dan sosialisasi.

26. Saran.

Untuk mendukung terciptanya keberhasilan suatu kebijaksanaan dan strategi nasional serta upaya-upaya yang ditempuh, maka disarankan beberapa langkah sebagai berikut:

a. Penyelesaian konflik vertikal yang bernuansa separatisme harus diselesaikan dengan pendekatan militer terbatas dengan pendekatan profesionalisme untuk menghindari korban yang tidak perlu di kalangan masyarakat dan pada tahap konsolidasi dan rehabilitasi diperlukan tindakan nyata yang memperhatikan aspek ekonomi dan sosial budaya serta keadilan yang bersandar pada penegakkan hukum, yang memerlukan keterpaduan tindakan dari segenap aparat pemerintah, kelompok elit dan masyarakat.

b. Penyelesaian konflik horisontal yang bernuansa SARA disarankan untuk diatasi melalui pendekatan hukum dan hak azasi manusia dengan tegas dan berani namun diikuti sikap yang arif, dengan tetap

mengutamakan faktor pemicu dan kemungkinan penciptaan kondisi dari para elit politik yang sedang bertikai.

c. Penyelesaian konflik akibat penerapan otonomi daerah yang menguatkan faktor perbedaan, disarankan kepemimpinan daerah harus mampu untuk meredam dan pemberlakuan cara *reward and punishment* dari strata pimpinan di atasnya.

d. Komitmen untuk bersatu dibawah naungan negara Republik Indonesia yang demokrasi dengan tatanan kelembagaan dan peraturan yang menjamin terciptanya hubungan harmonis antar masyarakat didalamnya, dan konsisten kepada upaya pemerataan kesejahteraan rakyatnya merupakan kondisi ampuh untuk mencegah ide dan tindakan-tindakan separatis, aspek stabilitas keamanan merupakan azas prioritas penanganan sebelum melangkah kepada aspek ekonomi, sosial dan politik walaupun dalam pelaksanaannya bersifat simultan.

e. Kepemimpinan nasional maupun daerah, sangat perlu untuk dipilih figur yang bisa memberikan teladan dan menjadi panutan dalam kepemimpinan, komitmen kepada persatuan nasional dan kepada usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

POLA PIKIR

- PANCSILA
- UUD 1945
- WASANTARA
- TANNAS
- GBHN

S	O	M
<ul style="list-style-type: none"> • SUPRA STRUKTUR • INFRA STRUKTUR • SUB STRUKTUR 	<ul style="list-style-type: none"> • KOMPONEN BANGSA • TOKOH MASYARAKAT • PEMERINTAH PUSAT & DAE-RAH. • PER UNDANG-UNDANGAN & HUKUM 	<ul style="list-style-type: none"> • SOSIALISASI • PUBLIKASI • EDUKASI • PERSUASI • REPRESI • REGULASI HUKUM & HAM

- PENGARUH LINGKUNGAN STRATEGIS
- EKSTERNAL
 - INTERNAL
 - PELUANG & KENDALA

MENCEGAH BEBERAPA DAE-RAH INGIN MEMISAHKAN DIRI DARI NKRI

BEBERAPA DAE-RAH TIDAK INGIN MEMISAHKAN DIRI DARI NKRI

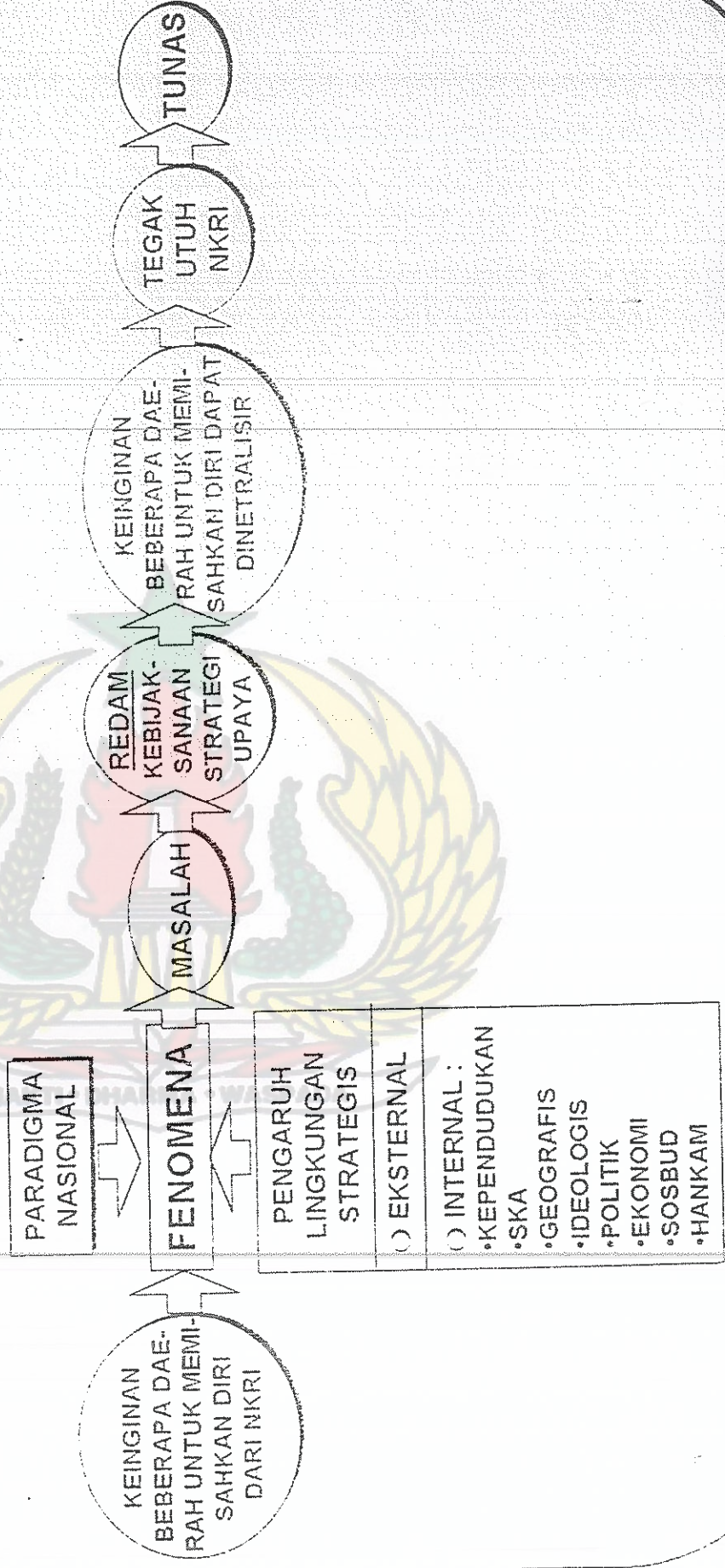
TEGAK UTUHNYA NKRI

TUNAS

FEED BACK

ALUR PIKIR

MENCEGAH KEINGINAN BEBERAPA RAH
UNTUK MEMISAHKAN DIRI DEMI TEGAK
UTUHNYA NKRI.



BIODATA PENULIS

1. Nama : Amirul Isnaini
2. Pangkat : Mayor Jenderal TNI
3. Tempat/Tgl lahir : Malang, 24 Maret 1952
4. Agama : ISLAM
5. Status : K-2
6. Alamat : Jl. RA.Fadillah, Cijantung-I Jakarta Timur
7. Pendidikan Militer :
 - a. Akabri 1975
 - b. Suslapa 1985
 - c. Seskoad 1989
 - d. Lemhannas 2001
8. Pendidikan Spesialisasi :
 - a. Para Komando 1976
 - b. Suspa Intel 1980
 - c. Suspa Intel Strat 1986
 - d. Sus Bhs Inggris 1987
 - e. Susfung Intel 1991
9. Penugasan Operasi :
 - a. Dan Ton Parako Ops Tim Tim 1977
 - b. Dan Ki Parako Ops Tim Tim 1982
 - c. Wadan Nanggala Ops Tim Tim 1988
 - d. Ka Tim Analisis Intelijen Ops Tim Tim 1989
 - e. Dan Sat Gas Intelijen Ops Aceh 1993
 - f. Dan Satgas Intelijen Ops Tim Tim 1995
 - g. As Intel Satgas Pembebas Sandera Ops Irja 1996
 - h. Wapang Darurat Militer Ops Tim Tim 1999
10. Penugasan Luar Negeri :
 - a. Taiwan 1980
 - b. Singapura 1990
 - c. Hawaii USA 1993
 - d. Thailand 2000
11. Pengalaman Jabatan :
 - a. Pama : Dan Ton Parako, ADC Kabakin, Dan Ki Parako, Kasi-1 Grup
 - b. Pamen : Wadan Denma, Pabanda Lid, Pabandya Lidgal, Waas Intel, Asintel Kopassus, Dan Rem 071/WK, Wadan Paspampres.
 - c. Pati : Wadan Paspampres, Dan Pus Intelad, Waaspam Kasad.
 - d. Jabatan terakhir : Danjen Kopassus hingga sekarang.